

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

VISI :

“Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk SDM yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis budaya Jawa Barat”

Oleh :

**TIM PENYUSUN
RENSTRA 2013-2018**



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2014**

KATA PENGANTAR

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya memiliki tata kelola administrasi negara yang efektif, efisien dan maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Dalam Era Globalisasi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus dapat membangun kemampuan dan kapasitas organisasi dalam lingkup regional dan nasional sehingga menjadi organisasi yang mampu eksis dalam era globalisasi. Untuk itu, di perlukan sebuah proses transformasi secara mendasar dan signifikan dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional, visioner, mandiri dan maju.

Merespon rencana pembangunan pendidikan di Jawa Barat sesuai dengan RPJPD 2005-2025, RPJMD 2013-2018 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka perlu disusun sebuah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2013-2018. Renstra merupakan sebuah dokumen perencanaan strategik untuk jangka menengah (5 tahun). Renstra tersebut berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi semua satuan atau unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan semua pihak terkait, stakeholders dan masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan tata kelola layanan pendidikan di Jawa Barat.

Dengan memperhatikan dinamika perkembangan secara substansial dalam pembahasan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; juga dengan kehadiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan aturan turunannya berupa Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014, dinilai perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Tahun 2013-2018 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, demi efektivitas penyelenggaraan tata kelola pendidikan di Jawa Barat ke depannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan revisi dokumen Renstra ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandung,

2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Prof. Dr. H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, CPA.

Pembina Utama Madya
NIP. 195708071986011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	5
1.4 Kerangka Pikir	9
1.5 Pendekatan Proses Penyusunan	10
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS	23
2.1 Struktur Organisasi Dinas	23
2.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas	25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas	26
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS DINAS	40
3.1 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Dinas	41
3.2 Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas	47
3.3 SWOT Analysis	49
3.4 Strategi Pembangunan Pendidikan	50
3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan	52
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	54
4.1 Visi, Misi	54
4.2 Tujuan dan Sasaran	57
4.3 Indikator Kinerja Utama (lampiran)	84

BAB V. PROGRAM, INDIKATOR KINERJA	69
PROGRAM (IKP) DAN KEGIATAN	
BAB VI. PENUTUP	78
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memasuki abad ke-21, setiap negara di dunia dihadapkan dengan berbagai peluang dan tantangan akibat terjadinya arus globalisasi. Isu globalisasi telah mengakibatkan terjadinya interaksi, transaksi, dinamika perkembangan dan kompetisi antar negara, antar bangsa, antar budaya di seluruh belahan dunia. Akibatnya, globalisasi membangun atau membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa di dunia tentang arti pentingnya daya saing, keunggulan, dan mutu sumber daya manusia (SDM).

Menjadi tugas dan peran negara melalui penyelenggaraan administrasi publik untuk membangun lingkungan strategis, yang memungkinkan terjadinya pengembangan SDM dalam rangka menciptakan keunggulan dan daya saing, agar mampu berkompetisi dalam lingkungan masyarakat global. Dimensi pengembangan SDM telah menjadi bagian dari cita-cita atau tujuan (*goals*) bangsa Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 di antaranya adalah ***melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa***, sangatlah memiliki nilai yang luhur dan agung; karena upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut bermakna untuk menciptakan kondisi bangsa dengan SDM yang berkualitas, unggul dan berdaya saing sehingga dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju baik di kawasan Asia Tenggara, Asia bahkan Dunia. Karena itu, tujuan nasional tersebut harus dapat diterjemahkan oleh Pemerintah menjadi berbagai kebijakan publik yang unggul. Sebab, bagaimanapun juga keunggulan dan daya saing sebuah negara akan ditentukan sejauhmana Pemerintah yang berkuasa mampu menyusun kebijakan-kebijakan yang unggul untuk kepentingan rakyatnya.

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kata kunci dalam upaya peningkatan kesejahteraan menuju masyarakat yang maju dan memiliki

keunggulan atau daya saing. Pendekatan yang ditempuh dalam upaya melakukan peningkatan kesejahteraan menuju masyarakat yang maju dan berdaya saing tersebut ditempuh melalui layanan **pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat**. Upaya perbaikan dan pemenuhan terhadap ketiga layanan kebutuhan dasar masyarakat diyakini berdampak penurunan tingkat kemiskinan masyarakat.

Hal itulah yang telah menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pembangunan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, dimana tingkat pencapaian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pembangunan diukur dengan menggunakan indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indeks komposit yakni gabungan dengan Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK) dan Indeks Daya Beli (IDB). Indeks Pendidikan ditentukan oleh 2 (dua) variabel yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); sedangkan Indeks Kesehatan ditentukan oleh 3 variabel yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI); serta Indeks Daya Beli ditentukan oleh variabel Pendapatan Perkapita Penduduk (PPP).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2015, diungkapkan visi jangka panjang pembangunan Jawa Barat 2005-2025 yakni : **“Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia”**. Secara bertahap menuju pencapaian visi tersebut telah ditempuh rangkaian tahapan pembangunan Provinsi Jawa Barat, yakni Tahap I, Periode 2005-2008 yang disebut Tahapan Penataan dan Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas SDM dengan visi pembangunan Jawa Barat : **”Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat”** ; Tahap II, Periode 2008-2013 yang disebut Tahapan Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dengan visi pembangunan Jawa Barat : **“Tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”**.

Dengan berpegang pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan masyarakat Jawa Barat yang berkelanjutan, maka ada 5 (lima) prinsip yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat, yaitu : (1) Melanjutkan, (2) Menuntaskan, (3) Memberi Dukungan, (4) Reposisi dan (5) Reorientasi. Untuk itu, kelanjutan Tahap II, adalah merupakan Tahap III, yaitu periode tahun 2013-2018 yang disebut Tahapan Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh. Pada Tahap III periode 2013-2018 telah dirumuskan Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu **“Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”**.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan SAKIP akan mencakup beberapa tahapan, yaitu : (1) Rencana Strategis, (2) Perjanjian Kinerja, (3) Pengukuran Kinerja, (4) Pengelolaan Data Kinerja, (5) Pelaporan Kinerja, dan (6) Review dan Evaluasi Kinerja. Dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2010 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, maka dijelaskan bahwa setiap SPKD/OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan, yang disebut Rencana Strategis SKPD/OPD yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari tuntutan kewajiban tersebut. Untuk itu, menjadi keharusan dan kebutuhan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu institusi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyusun rencana strategis (renstra) untuk periode 5 tahunan , dengan mengacu kepada *Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013-2018*.

Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan sebuah dokumen perencanaan strategik. Periode 5 (lima) tahunan berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi semua pihak yang terkait baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, stakeholders bidang pendidikan yang terkait serta seluruh masyarakat yang memiliki konsern dan orientasi pada penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat guna mewujudkan visi pembangunan Jawa Barat periode tahun 2013-2018, yaitu : “**Jawa Barat maju dan sejahtera untuk semua**”. Focus dokumen renstra strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini memuat tentang beberapa hal yaitu : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN pembanguan pendidikan di Jawa Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang disajikan secara sistematis, rasional, spesifik dan terukur.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan **Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018** secara umum dimaksudkan dari penyusunan renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang pelayanan, sumberdaya, dan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, beserta tantangan dan peluang pengembangan layanannya.
- b. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis pendidikan di Jawa Barat dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

- c. Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Pembangunan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, disertai dengan gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya.

Sedangkan Tujuan yang akan dicapai melalui **Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018** adalah :

- a. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- b. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan di wilayah kerjanya.
- c. Memberikan acuan dan wawasan kepada pelaku dan pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam merencanakan kegiatan, dan mengusulkan ide-ide kreatif maupun mengembangkan sikap kritis yang memberikan kemanfaatan bagi upaya, dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan **Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018** dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
13. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

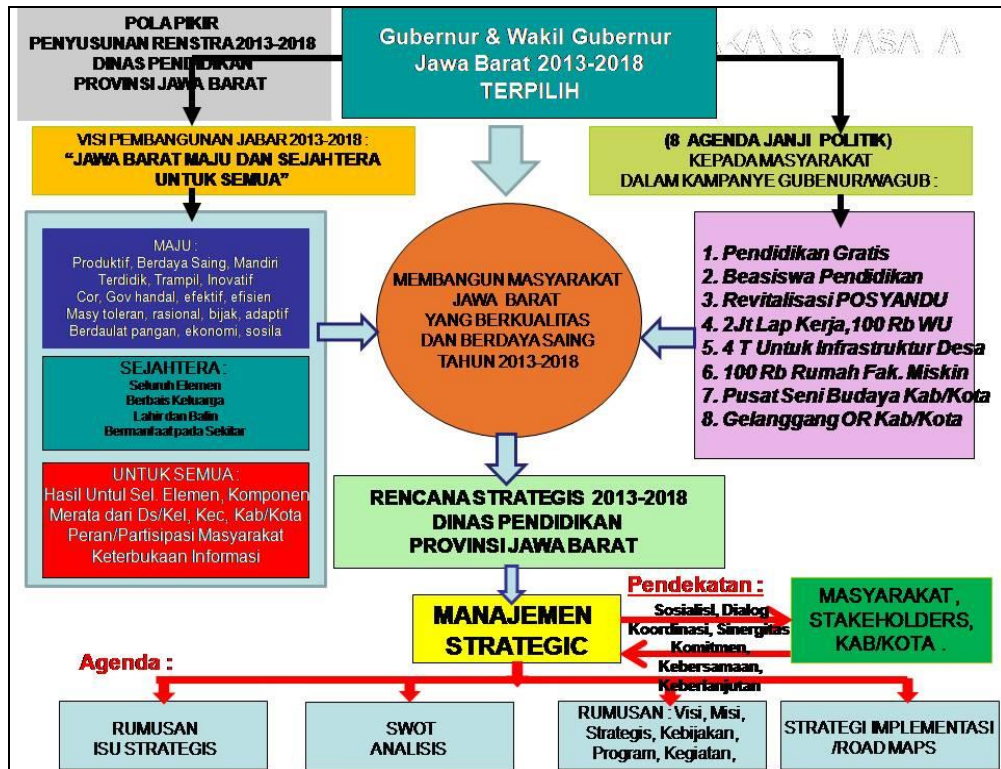
14. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
 30. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
 31. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 66 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66 Seri E);

32. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 164 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seia A);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 181 Seri E);
34. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1166-Pdb/2012 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;
35. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1630-Keu/2012 tentang Penunjukan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;
36. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 819/01-Set.Disdik tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;
37. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 819/02-Set.Disdik tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.29.32.5.2 tanggal 26 Desember 2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 dan perubahannya pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
39. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 120/64/Bapeda tanggal 24 Desember 2008 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2008 – 2013.

1.4 KERANGKA PIKIR

Bertolak dari maksud dan tujuan penyusunan **Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018**, maka kerangka pikir dalam penyusunan renstra ini disusun sebagai berikut :



Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan
Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

1.5 PENDEKATAN PROSES PENYUSUNAN

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan proses penyusunan **Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018**, ini mencakup : (1) Pendekatan politik, yang merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan Jawa Barat berdasarkan kebijakan Gubernur, (2) Pendekatan teknokratik, yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah berdasarkan teori dan konsep ilmiah, (3) Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap

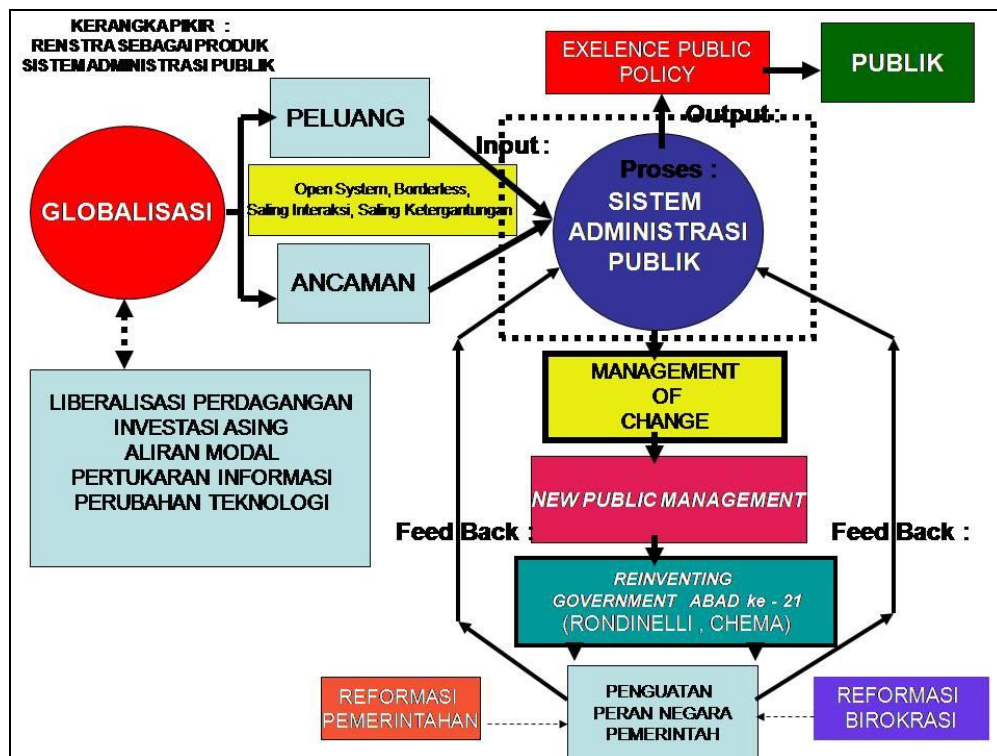
pembangunan. Bererapa teori dan konsep ilmiah yang dijadikan landasan konseptual dalam penyusunan renstra ini diuraikan sebagai berikut :

1.5.1 Administrasi Publik

Dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan terus berkembang, maka dituntut adanya perkembangan negara dalam mengurus masyarakat. Negara dalam melakukan penyelenggaraan urusan masyarakat dituntut untuk berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu wujudnya bagaimana negara membentuk dan mengelola beberapa organisasi atau lembaga yang tidak cukup diurus dengan cara-cara ‘biasa’ negara. Pada saat ini dapat ditemukan pada pembentukan BUMN dan BUMD (baik yang dikelola oleh negara maupun bukan oleh negara) dan lembaga kemitraan (*partnership*) antar negara dengan masyarakat (*quasi government organization*).

Dengan fenomena tersebut, menurut Nugroho (2008) menjadikan definisi administrasi negara atau administrasi publik ditantang untuk keluar dari khasanah administrasi *an sich*, namun sebagai sebuah manajemen. Pengelolaan negara tidak dapat lagi diselenggarakan dengan pola melayani, sesuai dengan makna etimologis administrasi (*ad+ministrare*) yang berarti *to serve*, dimana organisasi pemerintahan hadir hanya untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan rutin kepada publik, namun organisasi pemerintahan harus dapat menciptakan nilai-nilai (*values*) yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka menurut Nugroho (2008) *output* dari administrasi negara atau administrasi pemerintahan bukan hanya sekedar mengatur kehidupan bersama masyarakatnya, namun juga membangun kemampuan organisasi dalam lingkup nasional agar menjadi organisasi yang mampu bersaing dengan kapasitas global. Untuk itu, administrasi negara atau administrasi publik harus direformasi, agar terjadi perubahan melalui sebuah strategi manajemen (*management of change*), sehingga perubahan dapat berlangsung secara mendasar dan signifikan.



Gambar 1.2
Kerangka Pikir
Dokumen Rencana Strategis Sebagai Sebuah
Produk Sistem Administrasi Publik.

Tuntutan reformasi dalam administrasi negara atau administrasi publik, direspon dengan munculnya konsep tentang pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan administrasi negara. Masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sejalan dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan dan kompetensi masyarakat. Pola-pola lama dalam administrasi negara dinilai tidak mampu lagi merespon kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang. Untuk hal tersebut perlu dilakukan reformasi dalam pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik mencakup semua mekanisme, proses, dan lembaga yang merupakan saluran bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan, melaksanakan hak-hak hukum, melakukan pemenuhan kewajiban-kewajiban dan menyambungkan perbedaan-perbedaan yang ada. Untuk itu, terselenggaranya sebuah pemerintahan yang

baik akan dicirikan oleh adanya : (1) partisipasi, (2) penegakkan hukum, (3) transparansi, (3) responsitas, (4) kesetaraan, (5) akuntabilitas, (6) efisiensi dan efektivitas dan (7) visi strategis.

1.5.2 Administrasi , Organisasi dan Manajemen

Sebagai pengantar untuk memahami pengertian tentang administrasi, organisasi dan manajemen, diperlukan pemahaman awal tentang sistem. Pembahasan tentang administrasi, organisasi dan manajemen dapat diletakkan dalam konteks sistem. Berdasarkan etimologi, istilah sistem berakar dari bahasa Yunani yaitu *systema*, dalam bahasa Inggris ditulis *system*, yang mempunyai arti sebagai himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Sistem terdiri dari unsur-unsur yang saling bekerja sama membentuk suatu keseluruhan, apabila salah satu unsur tersebut hilang atau tidak berfungsi, maka gabungan keseluruhan tersebut tidak dapat lagi disebut sistem.

Beberapa ahli mencoba memberikan definisi tentang sistem. Menurut Buckley, "sistem adalah suatu kebulatan atau totalitas yang berfungsi secara utuh, disebabkan adanya saling ketergantungan di antara bagian-bagiannya" (*A whole that functions as a whole by virtue of interdependence of its parts*). H. Kerzner mengatakan bahwa "sistem adalah sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (*non-human*) yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir".

Sejalan dengan pemahaman sistem, Abdurrahmat (2006) menjelaskan bahwa hakekat dari administrasi adalah adanya penyelenggaraan upaya bersama atau kelompok manusia dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor determinan dari sebuah administrasi antara lain : (1) manajemen, (2) organisasi, (3) komunikasi/interaksi, (4) SDM, (5) sarana/prasarana, (6) dana, (7) lokasi/tempat, (8) lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka administrasi mengandung pengertian tentang proses daya upaya yang dilakukan oleh kelompok dengan bekerja sama secara rasional untuk kepentingan pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka organisasi dapat dipandang sebagai wadah dari berlangsungnya kegiatan administrasi, sedangkan organisasi dan manajemen merupakan sasaran dari kegiatan administrasi.

Administrasi memiliki peranan penting dalam menentukan jalannya roda kehidupan sebuah organisasi. Namun yang lebih penting, adalah SDM di belakang administrasi tersebut. Baik buruknya sebuah administrasi, sangat tergantung pada SDM yang menjalankannya. Apabila administrasi dijalankan oleh SDM yang baik, handal dan unggul, maka akan lebih memungkinkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam administrasi ditemukan adanya 3 (tiga) fungsi yang sangat penting, yaitu : (1) Fungsi Organisasi, yang menjelaskan bagaimana tugas/pekerjaan dibagikan kepada unsur organisasi; (2) Fungsi Manajemen, yang menjelaskan bagaimana tugas/pekerjaan direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dievaluasi; dan (3) Fungsi Kepemimpinan, yang menjelaskan bagaimana administrator/manajer melakukan kepemimpinan agar tujuan organisasi dapat dicapai.

Abdurrahmat menjelaskan bahwa fungsi manajemen berhubungan proses pembinaan atau pemberian bimbingan, pimpinan, pengarahan, pengaturan dan pengendalian atau fasilitasi dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Karena itu, inti dari manajemen pada akhirnya adalah kepemimpinan (*leadership*). Melalui manajemen semua kegiatan organisasi dikoordinir dan diarahkan oleh kepemimpinan menuju pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan, karena itu manajemen akan ditemukan pada setiap level organisasi.

Manajemen baik dipandang sebagai ilmu dan seni, memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dikaitkan dengan upaya-upaya dalam rangka pencapaian tujuan (*goals*) organisasi atau sistem pada masa depan. Menurut Luther Gulick (1965) manajemen merupakan ilmu, karena memiliki serangkaian teori dan konsep yang telah teruji seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Sebagai ilmu, menurut Gulick teori – teori dan konsep – konsep manajemen dapat memberikan penjelasan secara logis dan rasional tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia pada situasi tertentu, dan juga memungkinkan manusia untuk melakukan prediksi tentang apa yang akan terjadi akibat tindakan

yang dilakukan manusia. Menurut Mary Parker Follet manajemen merupakan seni, seperti dikutip Stoner (1986), karena manajemen berhubungan dengan proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara menggerakkan, mengatur dan memimpin. (*Management is the art of getting things done through people*).

Stoner dan Freeman (1992), mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi *planning* dan *decision making*, *organizing*, *leading* dan *controlling*. Manajemen dikatakan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Robbin dan Coulter (1996) menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Efisiensi menunjukkan hubungan antara *input* dan *output* dengan mencari biaya sumber daya minimum, sedangkan efektif menunjukkan makna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Nanang Fattah (2003) menjelaskan bahwa dalam manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*). Manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan atau mengawasi upaya-upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

1.5.3 Manajemen Strategis

Berdasarkan etimologi, istilah "strategi" berakar dari bahasa Yunani kuno yang mempunyai arti sebagai sebuah "seni berperang". Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi adalah alat untuk mencapai tujuan.

Stephanie K Marrus seperti yang dikutip oleh Sukristono (1995) dan Husien Umar (2003), kata strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya tentang bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Sedangkan Husien Umar (2003) menyatakan bahwa manajemen strategis adalah sebuah manajemen yang berfungsi seperti manajemen yang lainnya, yaitu tentang bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasikan, bagaimana melaksanakan dan bagaimana mengendalikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan sebuah proses perencanaan bagi sebuah organisasi akan memiliki beberapa fungsi berikut ini : (1) Untuk menterjemahkan kebijakan umum, (2) Untuk memperkirakan atau memprediksi masa depan, (3) Untuk mengekonomiskan penggunaan sumber daya yang terbatas, (4) Untuk lebih memberikan kepastian suatu aktivitas/kejadian, (5) Menjadi sarana atau alat koordinasi antar proses/fungsi manajemen dalam organisasi, dan (6) Menjadi sarana atau alat pengawasan atau pengendalian dalam proses/fungsi manajemen dalam organisasi.

Sesuai dengan tingkatan manajemen, proses perencanaan dalam organisasi dikategorikan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu (1) perencanaan strategis dan (2) perencanaan operasional. Pertama, perencanaan strategis, merupakan bagian dari manajemen strategis, yang terdiri atas tahap-tahap : (a) perumusan (*formulating*), (b) penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar proses atau fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya di masa depan. Sebuah perencanaan strategis akan lebih berfokus pada bagaimana manajemen puncak organisasi menyusun visi, misi, falsafah, kebijakan dan strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Kedua, perencanaan operasional, merupakan perencanaan yang lebih mengarah pada bidang fungsional organisasi untuk memperjelas makna suatu strategi. Perencanaan operasional memberikan acuan atau pedoman lebih spesifik untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan strategi.

Memperjelas makna perencanaan strategis, maka perlu dibedakan konsep berpikir strategik dan berpikir taktis, seperti dijelaskan oleh Peter Drucker yang dikutip oleh Wahyudi dan Husien Umar (2003), seperti tabel 1.1.

Tabel 1.1 Berpikir Strategik Vs Berpikir Taktis

No.	Berpikir Strategik	Berpikir Taktis
1	Apa yang harus kita kerjakan ?	Bagaimana mengerjakannya ?
2	Mengerjakan sesuatu yang benar.	Mengerjakan sesuatu dengan benar.
3	Menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan	Menggunakan pasukan/tentara untuk memenangkan pertempuran.

Untuk memudahkan dalam melakukan proses perencanaan strategik, maka biasanya dalam pendekatan manajemen strategik dilakukan dengan menggunakan *tool* yang dinamakan model perencanaan strategik, yang terdiri atas : (a) model Whelen-Hunger, (b) model Fred R. David, dan (c) model Gleen Baseman dan Arvind Platak. Dalam penyusunan **Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018**, digunakan pendekatan model Whelen-Hunger.

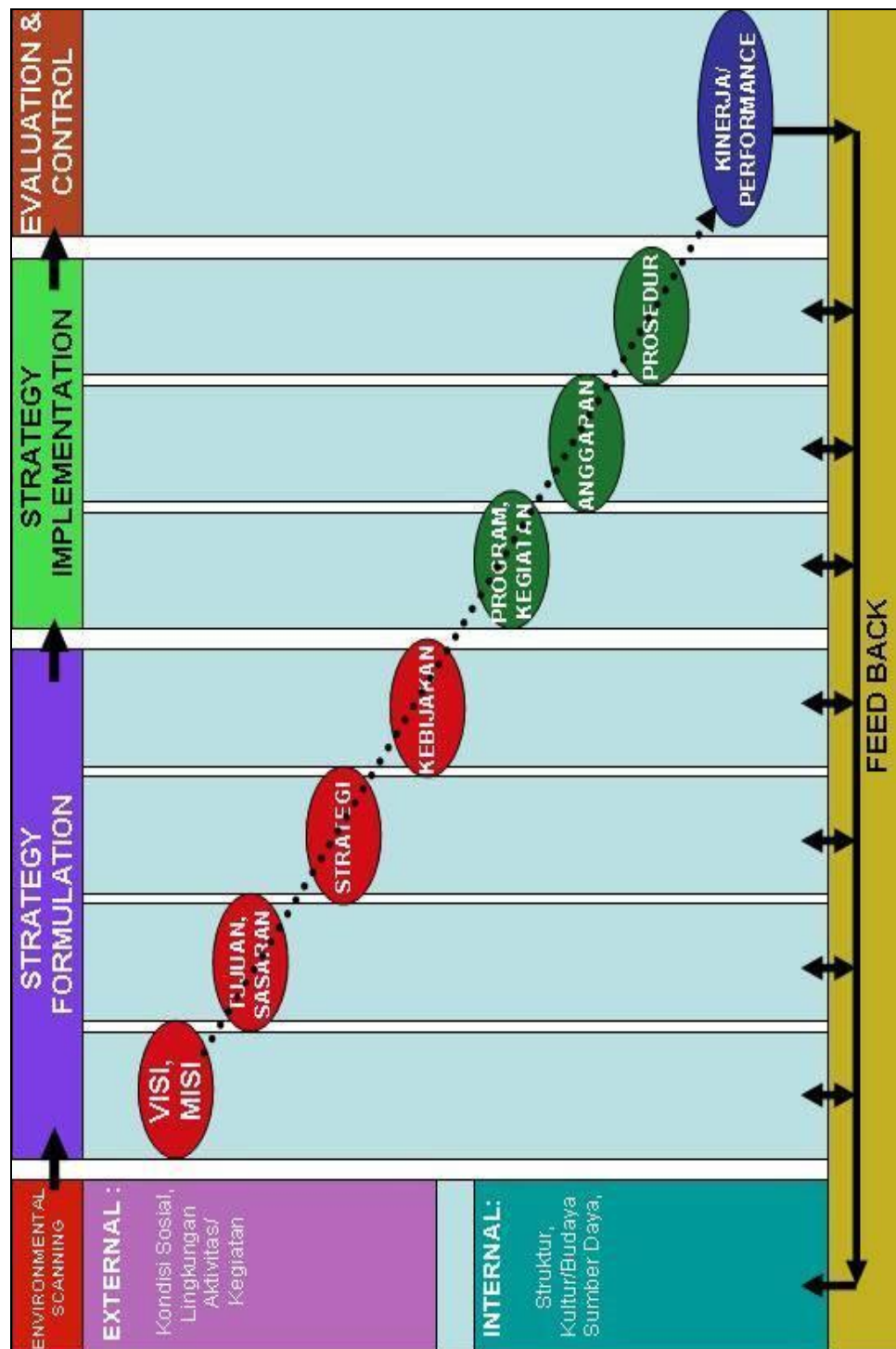
Proses perumusan strategi akan mencakup penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan; proses implementasi strategi akan mencakup pelaksanaan program, kegiatan, anggaran dan prosedur; dan proses pengendalian dan evaluasi strategi akan mencakup pengendalian dan evaluasi unjuk kerja atau kinerja sebagai hasil pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, beberapa faktor ekologis dalam lingkungan eksternal, terdiri atas kondisi lingkungan sosial, lingkungan aktivitas/kegiatan, sedangkan faktor-faktor ekologis dalam lingkungan internal terdiri atas aspek – aspek struktur, aspek-aspek kulture/budaya dan sumber daya. Setiap tahapan proses yang dilakukan akan menghasilkan keluaran yang menimbulkan adanya respon dan interaksi satu sama lain dalam wujud umpan balik (*feed back*) . Pendekatan perencanaan strategis dengan menggunakan model Whelen-Hunger seperti dijelaskan pada Gambar 1.3.

Berdasarkan arah perumusan strategi, proses perencanaan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu : (a) pendekatan atas bawah (*top down*), (b) pendekatan bawah ke atas (*bottom up*), dan (c) pendekatan kombinasi *top down* dan *bottom up*. Pertama, pendekatan *top down* dimana penyusunan

Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dilakukan oleh pimpinan organisasi atau lembaga (Kepala Dinas) dengan menterjemahkan visi dan misi lembaga atau organisasi dengan mengacu pada RPJPD (Tahun 2005-2025) dan RPJMD (Tahun 2013-2018) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Jawa Barat dan Peraturan Gubernur yang terkait. Sosialisasi dan diseminasi renstra ini pada tahap selanjutnya akan dilakukan dengan pendekatan melalui forum rapat koordinasi pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat secara berjenjang khususnya pendidikan yang dikoordinasikan oleh Bapeda Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Kedua, pendekatan *bottom up*, dimana penyusunan renstra dilakukan dimana pimpinan organisasi atau lembaga (Kepala Dinas) menjelaskan tentang kondisi lingkungan eksternal, internal lembaga atau organisasi dinas, dan selanjutnya menyampaikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan, selanjutnya menyerahkan kewenangan kepada unit-unit kerja di dinas (bidang, balai) untuk menterjemahkan atau menyusun menjadi perencanaan yang lebih operasional dalam bentuk program, kegiatan, penganggaran dan prosedur. Penyusunan renstra dengan pendekatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan unit atau satuan kerja (bidang, balai) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan semua stakeholders terkait.

Ketiga, pendekatan kombinasi antara pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*, dimana pimpinan organisasi atau lembaga (Kepala Dinas) dalam melakukan perumusan strategi organisasi atau lembaga dengan melakukan sinergitas antara proses penterjemahkan visi dan misi Pemerintah Daerah (Kepala Daerah Provinsi atau Gubernur) dengan proses penjelasan kondisi lingkungan eksternal, internal lembaga atau organisasi dinas, visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan kepala dinas kepada pimpinan unit-unit kerja (bidang, balai) di dinas.



Gambar 1.3
Perencanaan Strategis Berdasarkan Model Whelen-Hunger

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan **Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018** disajikan seperti di bawah ini :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Kerangka Pikir
- 1.5 Pendekatan Proses Penyusunan
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS

- 2.1 Struktur Organisasi Dinas
- 2.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS DINAS

- 3.1 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Dinas
- 3.2 Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas
- 3.3 SWOT Analysis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 - 4.1.1. Visi Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 - 4.1.2 Misi Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pendidikan Tahun 2013-2018
 - 4.2.1 Tujuan Pembangunan Pendidikan
 - 4.2.2 Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan

4.2.3 Strategi dan Kebijakan Pendidikan Provinsi Jawa Barat

4.2.4 Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2013-2018

4.2.5 Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2013-2018

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PENDIDIKAN JAWA BARAT

5.1. Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator

Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

5.2. Kelompok Sasaran

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYAN DINAS

2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberi tanggungjawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terdiri atas :

- 1). Kepala Dinas,
- 2). Sekretariat, yang membawahkan :
 - (a). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - (b). Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - (c). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 3). Bidang Pendidikan Menengah Umum, membawahkan :
 - (a). Seksi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - (b). Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
 - (c). Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana;
- 4). Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, membawahkan :
 - (a) Seksi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;

- (b) Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
- (c) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana;
- 5). Bidang Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus, membawahkan :
 - (a) Seksi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - (b) Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
 - (c) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana;
- 6). Bidang Pendidikan Tenaga Kependidikan Bina PAUDNI dan DIKDAS, membawahkan :
 - (a). Seksi PTK SMA dan PKLK;
 - (b). Seksi PTK SMK;
 - (c). Seksi Bina PAUDNI dan DIKDAS;

Selain Sekretariat dan Bidang sebagaimana di atas, Dinas Pendidikan juga dilengkapi dengan 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Balai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2017, yaitu :

- 1). Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, membawahkan :
 - (a). Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b). Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - (c). Seksi Penyelenggaraan Pelatihan.
- 2). Balai Pengembangan Bahasa Kesenian Daerah (BPBKD), membawahkan :
 - (a). Sub Bagain Tata Usaha;
 - (b). Seksi Pengembangan Bahasa Daerah;
 - (c). Seksi Pengembangan Kesenian Daerah.
- 3). Balai Pelayanan & Pengawasan Pendidikan Wilayah I, membawahkan :
 - (a). Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b). Seksi Pelayanan pendidikan;
 - (c). Seksi Pengawasan Pendidikan;
- 4). Balai Pelayanan & Pengawasan Pendidikan Wilayah II, membawahkan:

- (a). Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b). Seksi Pelayanan pendidikan;
 - (c). Seksi Pengawasan Pendidikan.
- 5). Balai Pelayanan & Pengawasan Pendidikan Wilayah III, membawahkan:
- (a). Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b). Seksi Pelayanan pendidikan;
 - (c). Seksi Pengawasan Pendidikan.
- 6). Balai Pelayanan & Pengawasan Pendidikan Wilayah IV, membawahkan:
- (a). Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b). Seksi Pelayanan pendidikan;
 - (c). Seksi Pengawasan Pendidikan.
- 7). Balai Pelayanan & Pengawasan Pendidikan Wilayah V, membawahkan:
- (a). Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b). Seksi Pelayanan pendidikan;
 - (c). Seksi Pengawasan Pendidikan.
- 8). Balai Pelayanan & Pengawasan Pendidikan Wilayah VI, membawahkan:
- (a). Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b). Seksi Pelayanan pendidikan;
 - (c). Seksi Pengawasan Pendidikan.
- 9). Balai Pelayanan & Pengawasan Pendidikan Wilayah VII, membawahkan:
- (a). Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b). Seksi Pelayanan pendidikan;
 - (c). Seksi Pengawasan Pendidikan.

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat NomorTahun tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provsinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, meliputi:

- a. Manajemen Pendidikan meliputi Pengelolaan pendidikan menengah dan Pengelolaan pendidikan khusus.
- b. Kurikulum meliputi Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- c. Perizinan Pendidikan meliputi Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- d. Bahasa dan Sastra meliputi Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- e. Melaksanakan tugas dekonsentrasi sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud di atas , Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan **kebijakan teknis** di bidang pendidikan, pada sub urusan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan **kebijakan teknis** di bidang pendidikan, pada sub urusan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi dinas meliputi 3 domain utama yaitu : (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) mutu dan relevansi pendidikan, serta (3) tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan. Ketiga domain layanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki berbagai permasalahan dan tantangan dalam setiap penyelenggaraan jenjang, jalur dan satuan pendidikan, sebagaimana digambarkan di bawah ini :

2.3.1 Permasalahan dan Tantangan

a. Pendidikan Dasar

- (1) Siswa
 - Rawan Drop Out (DO) SD dan SMP yang lokasi rumah siswa jauh dari sekolah terutama dipedesaan.
 - APM SLTP dan APK masih dibawah target.
- (2) Kurikulum
 - Pengembangan materi sesuai lingkungan sukar, karena materi nasional bobotnya sangat besar.
 - Belum mantapnya budaya pengendalian Daerah/Desentralisasi.
 - Pelaksanaan materi lokal belum mantap.
- (3) Guru
 - Jumlah guru masih kurang dan persebarannya tidak merata.
 - Kualifikasi guru SD, SLB dan SMP masih kurang (guru SD dan SLB dibawah D-II, Guru SMP dibawah D-III).
 - Profesionalisme masih rendah, terutama dipedesaan.
 - Kesejahteraan guru secara keseluruhan masih kurang apalagi dibandingkan dengan kesejahteraan dosen diperguruan tinggi.

- Terhambatnya perkembangan karier guru dalam pelaksanaan materi, rotasi maupun promosi.
- (4) Sarana / Prasarana
- Jumlah Taman Kanak – Kanak masih kurang dan persebarannya tidak merata.
 - Sarana prasarana belajar belum mencukupi dan masih banyak yang rusak.
- (5) Pengelolaan.
- Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan menjadi wewenang daerah Kabupaten/Kota mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.
 - Pengelolaan program Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat.
 - Pengendalian dan supervisi program Dekonsentrasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
 - Pada posisi Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom, pengendalian dan supervisi program tidak efektif.
 - Sistem pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya.
- (6) **Tantangan Ke Depan :**
- Pra Sekolah
 - Perluasan memperoleh kesempatan pendidikan melalui:
 - ✓ Membangun UGB TK.
 - ✓ Rehabilitasi Gedung TK.
 - ✓ Pengangkatan guru baru.
 - ✓ Mutu Pendidikan.
 - Masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah – masalah pendidikan
 - Meningkatnya motivasi guru melalui peningkatan pelayanan (bantuan untuk guru yang memasuki pension) dalam rangka kesejahteraan guru.

➤ Sekolah Dasar (SD).

- Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui :
 - ✓ Melaksanakan double shift.
 - ✓ Revitalisasi : rehabilitasi dan refungsionalisasi gedung.
 - ✓ Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - ✓ Pemerataan dan Pengangkatan guru baru.
 - ✓ Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan.
 - ✓ Kurikulum/pokok bahasan memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
 - ✓ Meningkatkan profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan.
 - ✓ Meningkatkan kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar, kecuali alat – alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah.
 - ✓ Masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah-masalah.
 - ✓ Meningkatkan motivasi guru melalui peningkatan pelayanan dalam rangka kesejahteraan guru.

- Peningkatan Efisiensi Melalui :
 - ✓ Meningkatkan kemampuan perencanaan para perencana tingkat Kantor Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan dan sekolah.
 - ✓ Menyusun dan melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, memelihara dan memanfaatkannya.
 - ✓ Memanfaatkan pendekatan community dan School Based Management melalui pemberdayaan institusi.

- Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui:
 - ✓ Membangun U S B.
 - ✓ Membangun R K B.
 - ✓ Melaksanakan double shift sampai dengan 1.6.
 - ✓ Penambahan SMP Terbuka.
 - ✓ Rehabilitasi.
 - ✓ Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Lanjutan.
 - ✓ Pemerataan dan pengangkatan guru baru.
 - ✓ Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wajar pendidikan dasar 9 tahun.
 - Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Melalui :
 - ✓ Kurikulum/pokok bahasan memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
 - ✓ Meningkatnya profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang

lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan.

- ✓ Meningkatnya kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada di lingkungan sekitar, kecuali alat – alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah.
- ✓ Masyarakat perlu diikuti sertakan dalam memecahkan masalah–masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/kurikulum.
- ✓ Meningkatnya motivasi guru melalui peningkatan pelayanan dalam rangka kesejahteraan guru.

○ Peningkatan Efisiensi melalui :

- ✓ Meningkatnya kemampuan perencanaan para perencana tingkat Kantor Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan dan sekolah.
- ✓ Menyusun dan melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, memelihara dan memanfaatkannya.
- ✓ Memantapkan system pengawasan, pengendalian dan sitem pelaporan dengan memperluas fungsi pengawas tidak hanya pada bidang administrasi saja tetapi juga bidang studi.
- ✓ Memantapkan pendekatan School Based Management dan Community Based Management melalui pemberdayaan institusi.

- ✓ Meningkatkan fungsi institusi dan pengisian lowongan kerja kepala sekolah, kepala urusan tata usaha di sekolah.

b. Pendidikan Menengah.

(1) Siswa.

- Rawan drop out (DO) mengacu kepada jumlah penduduk pra sejahtera dan Sejahtera I.
- Siswa yang masuk ke SMK mayoritas berasal dari kalangan masyarakat menengah kebawah padahal kegiatan proses belajar mengajar memerlukan dukungan biaya yang cukup tinggi.

(2) Kurikulum.

- Kekurangan guru dalam mengimplementasikan kurikulum.
- Sukarnya mencari industri pasangan dalam rangka pendidikan system ganda (PSG) oleh karena banyak perusahaan/dunia usaha dan industri yang menghentikan usahanya akibat bisnis ekonomi dan disusul dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak.
- Kesesuaian guru dengan program studi untuk tiap – tiap SMK masih belum memadai.
- Keterikatan dunia usaha dan industri untuk pelaksanaan system ganda tidak didukung oleh peraturan.

(3) Ketenagaan.

- Jumlah guru masih kurang dan tidak merata.
- Kualitas guru masih terdapat sebagian guru SMA dan SMK belum berkualifikasi (dibawah S-1).

(4) Sarana dan Prasarana.

- Penyebaran SMA dan SMK masih kurang dan belum merata.
- Daya tampung masih kurang.

- Masih terdapat sebagian sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai.

(5) **Pengelolaan**

- Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan menjadi wewenang daerah Kabupaten/Kota mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.
- Pengelolaan program Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) **Tantangan Ke Depan :**

- Sekolah Menengah Atas (SMA)

Perlu memberikan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui :

- Pemberian beasiswa.
- Pemerataan pendidikan.
- Pemerataan dan pengangkatan guru baru.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui :

- Kurikulum/pokok bahasan memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- Meningkatnya profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional. Materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan.
- Meningkatnya kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada di lingkungan sekitar, kecuali alat – alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah.

- Masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah– masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/ kurikulum.
- Meningkatnya motivasi guru melalui peningkatan pelayanan (pemberian imbalan, angka kredit, kenaikan pangkat) dalam rangka kesejahteraan guru.
- Menetapkan school based management dan community based management melalui pemberdayaan institusi.

Peningkatan Efisiensi melalui :

- Peningkatan kemampuan perencanaan para perencana tingkat Kantor Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan dan sekolah.
- Standarisasi sarana dan prasarana serta pemasyarakatan, pemelihara dan pemanfaatannya.
- Meningkatkan kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar (kecuali alat-alat sukar dibuat, perlu disediakan oleh Departemen).
- Masyarakat perlu diikut sertakan dalam memecahkan masalah–masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/ kurikulum.
- Meningkatkan motivasi guru melalui peningkatan pelayanan (pemberian imbalan, angka kredit, kenaikan pangkat) dalam rangka kesejahteraan guru.

➤ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui:

- Membangun USB.

- Membangun RKB.
- Rehabilitasi.
- Pemberian Beasiswa
- Pemerataan dan pengangkatan guru baru.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui :

- Kurikulum/pokok bahasan memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- Meningkatnya profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan kondisi lingkungan
- Mengoptimalkan pelaksanaan unit produksi disekolah.
- Meningkatnya kelancaran program system ganda, untuk itu perlu ada ketentuan yang mengikat dunia usaha/industri untuk kerja sama dengan pendidikan.
- Meningkatnya kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar (kecuali alat-alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh Departemen).
- Masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah – masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/ kurikulum.
- Meningkatnya motivasi guru melalui peningkatan pelayanan.
- Melaksanakan pendidikan system ganda (PSG) dalam rangka meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan

dan kesepadanan (link and match) antara lembaga pendidikan, pelatihan kejuruan dan dunia kerja.

- Melaksanakan unit produksi di SMK dalam rangka meningkatkan keahlian produktif.

Peningkatan Efisiensi melalui :

- Peningkatan kemampuan perencanaan para perencana tingkat Kantor Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dan sekolah.
- Standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, pemeliharaan dan pemanfaatannya.
- Memantapkan system pengawasan, pengendalian dan system pelaporan melalui program pemberdayaan institusi dengan pendekatan–pendekatan school based management dan community based management.

c. Pendidikan PAUDNI

(1) Warga Belajar

- Tempat domisili warga belajar berpartisipasi dan sebagian besar banyak yang lebih tertarik bekerja daripada melanjutkan pendidikan.

(2) Kurikulum

- Pengembangan materi sesuai dengan lingkungan sukar, karena materi nasional bobotnya sangat besar.
- Belum mantapnya budaya pengendalian daerah/desentralisasi.
- Pelaksanaan Materi Lokal Belum mantap.

(3) Tenaga

- Kesejahteraan para tutor masih memprihatinkan

(4) Kelompok Belajar

- Perkembangan Kelompok Belajar belum didukung oleh sarana yang memadai.
- (5) **Pengelolaan**
- Koordinasi antara pemerintah dengan lembaga yang mengelola Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah belum optimal
- (6) **Tantangan Ke Depan :**
- Pemerataan dan demokratisasi pendidikan luar sekolah
 - Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kelompok belajar Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
 - Penyuluhan dan pembinaan kepada guru–guru olahraga yang ada disekolah guna meningkatkan profesionalisme dalam bidang IPTEK olahraga
 - Meningkatkan kemampuan perencanaan pada tingkat kantor Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan dan SKB.
 - Mutu dan Relevansi Pendidikan
 - Mengadakan penarikan dan pengangkatan penilik.
 - Meningkatkan profesionalisme para Pembina PKBM dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga belajar asuhannya.
 - Meningkatkan koordinasi dengan instansi–instansi terkait.
 - Efisiensi dan Efektifitas.
 - Adanya ketentuan yang mengikat tentang pelaksanaan khusus PNF agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

d. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

- (1) Murid
 - Masih banyaknya anak berkelainan usia sekolah belum masuk SLB.
 - Rawan drop out (DO) yang disebabkan oleh watak dan karakter anak berkelainan.
 - Rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kelainan/kecacatan.
- (2) Kurikulum
 - Belum adanya kurikulum resmi/Nasional untuk semua jenis dan program Sekolah Luar Biasa (SLB).
- (3) Ketenagaan
 - Jumlah guru masih kurang.
 - Kualifikasi pendidikan guru masih rendah.
 - Implementasi pemahaman kurikulum masih rendah.
- (4) Sarana dan Prasarana.
 - Jumlah SLB masih kurang dan persebarannya belum merata.
 - Sarana belajar belum mencukupi sehingga PBM berlangsung di rumah penduduk atau tempat lain yang tidak memenuhi syarat
- (5) Pengelolaan.
 - Sebagian besar SLB (90%) diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) sehingga pemahaman standarisasi sulit untuk dilaksanakan.
 - Terbatasnya tenaga supervisor SLB, sehingga rasio pengawas yang ada dengan sekolah tidak memadai.
 - Sistem pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya.
 - Kualifikasi pendidikan guru masih rendah.

(6) Tantangan Ke Depan :

- Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui :
 - Membangun USB.
 - Rehabilitasi gedung.
 - Pemberian beasiswa melalui program JPS.
 - Pemerataan dan pengangkatan guru baru.
 - Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya SLB.
- Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan melalui :
 - Kurikulum/pokok bahasan memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
 - Meningkatnya profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan.
 - Meningkatnya kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada di lingkungan sekitar, kecuali alat-alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah.
 - Masyarakat perlu diikuti sertakan dalam memecahkan masalah– masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/ kurikulum.
 - Meningkatnya motivasi guru melalui peningkatan pelayanan dalam rangka kesejahteraan guru.
- Peningkatan Efisiensi melalui :

- Meningkatkan kemampuan perencanaan para perencana tingkat Kantor Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan dan sekolah.
- Menyusun dan melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, memelihara dan memanfaatkannya.
- Memanfaatkan pendekatan community dan school based management melalui pemberdayaan institusi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS DINAS

Gambaran berbagai isu strategi yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas didapatkan melalui proses analisis situasi yang dihadapi dinas, yang lebih populer disebut analisis lingkungan secara mendalam. Analisis lingkungan merupakan kegiatan untuk menemukan gambaran kondisi lingkungan baik internal dan eksternal yang mempengaruhi keberadaan dinas. Analisis situasi dilakukan juga untuk mempelajari dan mengkaji berbagai faktor yang dapat menjadi “**kekuatan**” (*strength*), “**kelemahan**” (*weakness*), “**peluang**” (*opportunity*) atau “**ancaman**” (*threats*) dari atau terhadap dinas.

Gambaran kondisi lingkungan internal-eksternal diawali dengan proses identifikasi situasi internal-eksternal atau sering dikatakan sebagai “*environmental scanning*”. Proses identifikasi situasi yang dimaksud adalah proses untuk mendeskripsikan situasi lingkungan dinas, belum sampai tahap memberikan penilaian (*assessment*), apakah suatu kondisi itu merupakan kekuatan-kelemahan-peluang-atau ancaman dari atau terhadap dinas.

Lingkungan eksternal dinas mencakup lingkungan pada level internasional, level nasional dan level bisnis. Untuk kepentingan analisis lingkungan eksternal pada level internasional dan level nasional digunakan analisis PEST, yaitu analisis terhadap faktor-faktor (1) *Politic*, (2) *Economic*, (3) *Social* dan (4) *Technology*. Sedangkan analisis lingkungan eksternal pada level bisnis digunakan analisis strategi bersaing (*competitive strategy*) dari Michael R. Porter, yang terdiri atas 5 faktor penggerak yaitu : (1) *new market entrants*, (2) *supplier power*, (3) *subtitute*, (5) *buyer power*, dan (6) *competitive rivalry*.

Lingkungan internal dinas mencakup lingkungan pada level *corporate*, level bisnis dan level fungsi. Hal-hal yang akan dideskripsikan pada lingkungan internal dinas, misalnya aspek keuangan, aspek SDM, aspek pemasaran, aspek operasional dan aspek manajemen. Untuk kepentingan analisis lingkungan

internal pada level *corporate* digunakan pendekatan *SWOT Matrix*, *Balanced Score Card (BSC)*, dan pada level fungsi digunakan pendekatan *7 S Mc KENSEY*.

3.1. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE) DINAS

3.1.1 Analisis PEST

Analisis PEST mencakup faktor-faktor : (1) *Politic*, (2) *Economic*, (3) *Social* dan (4) *Technology*, yang berpengaruh terhadap dinas.

a. Analisis Faktor Politik

Politik dalam arti luas, dipahami sebagai suatu urusan atau pembicaraan yang menyangkut kepentingan umum (publik) atau berpautan dengan publik (*pro bono publico*). Kepentingan dan urusan umum menjadi isi dan makna politik.

Politik adalah hak kodrati setiap manusia. Politik merupakan kesempatan dan kemungkinan yang harus dimiliki setiap orang dan juga harus diberikan kepada setiap orang untuk boleh hidup dan bergerak di muka umum, membina persekutuan hidup dengan orang lain, terlibat dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dan menikmati hasil perjuangan masyarakat. Karena itu, politik dapat dimengerti sebagai keseluruhan tindakan yang berhubungan dengan pelayanan umum, yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dsbnya.

Karena itu, menghargai setiap orang memiliki hak akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan atas hal politik seseorang. Tuntutan akan adanya kebutuhan dan kepentingan untuk memasukkan akses pendidikan yang berkualitas dalam ranah publik adalah salah satu wujud penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat. Hal tersebut pada saat ini juga telah menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan dalam rangka membangun masyarakat yang lebih demokratis menuju terwujudnya tata kehidupan masyarakat madani (*civil society*).

Pada level internasional, tuntutan akan adanya kebutuhan dan kepentingan untuk memasukkan akses pendidikan yang berkualitas dalam ranah publik ditandai dengan adanya beberapa moment penting, yaitu : (1) *Millenium*

Development Goals (MDG) 2015, yang memberi pesan tentang pentingnya aspek pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh dunia, (2) **Deklarasi DAKAR - Senegal Tahun 2000 : "Education For All"**, yang salah satu dari isi butir deklarasi tersebut menyampaikan tentang pentingnya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan dalam rangka perwujudan SDM yang berkualitas, (3) **Standar ISO**, yaitu Standar Internasional yang ditetapkan sebagai bagian dari upaya perwujudan pengelolaan (manajemen) yang memberikan kepuasan pada pelanggan (*customer*).

Pada level nasional, tuntutan akan adanya kebutuhan dan kepentingan untuk memasukkan akses layanan pendidikan yang berkualitas dalam ranah publik ditandai dengan adanya beberapa ketentuan penting, yaitu : (1) **Pembukaan UUD 1945**, yang menyatakan tentang Tujuan Nasional Bangsa Indonesia, diantaranya : Melindungi segenap bangsa Indonesia, Mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) **UUD 1945 (Amandemen IV)**, yang menyatakan Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31, ayat 1); (3) **UU No. 20/2003 tentang SISDIKNAS** pada pasal 8 dijelaskan bahwa "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan", dan pada pasal 9 dijelaskan bahwa "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan".

Selain itu, secara realitas terjadi dinamika perkembangan dalam pembahasan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang selaras dengan agenda kepemimpinan baru Pemerintahan RI tahun 2014-2019, yaitu Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden dan H. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, dengan agenda NAWA CITA nya. Hal tersebut disertai hadirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004, Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan aturan turunannya berupa Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Rview Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Analisis Faktor Ekonomi

Ekonomi dipahami sebagai domain pembicaraan yang menyangkut penguasaan dan pengelolaan berbagai sumber daya (resources) untuk mendatangkan kesejahteraan atau kemakmuran bagi rakyat atau kepentingan umum (publik). Hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran adalah hak kodrati setiap manusia. Karenanya setiap orang harus diberikan hak yang sama untuk dapat memanfaatkan dan menikmati berbagai sumber daya yang tersedia untuk mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal itu sangat dimungkinkan apabila setiap orang memiliki pengetahuan, ilmu dan teknologi yang diperlukan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Dalam rangka itu maka mendapatkan hak akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi sesuatu yang penting bagi setiap orang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan atas hak ekonomi seseorang.

Pada level internasional, tuntutan terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat, ditandai dengan adanya beberapa moment penting di dunia yaitu : (1) Hadirnya World Trade Organization (WTO); (2) Asean Free Trade Area (AFTA); (3) Asia Pasific Economic Cooperation (APEC); (4) Organizing of Economic Development and Cooperative (OECD); (5) Global Crisis. Setiap bangsa-bangsa di dunia perlu meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan, ilmu dan teknologi agar hak-hak ekonomi rakyatnya dapat terlindungi terhadap berbagai kemungkinan dampak yang terjadi akibat hadirnya berbagai momentum di atas.

Pada level nasional, tuntutan terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat, ditandai dengan adanya beberapa moment penting, yaitu : (1) Krisis Ekonomi (Moneter) Secara Nasional; (2) Ambruknya sektor industri padat modal secara nasional; (3) Capital Out Flow, yaitu banyak investor membawa modal investasinya keluar negeri, akibat ekonomi biaya tinggi dan sistem birokrasi dan regulasi yang menekan investor; (4) Terjadinya banyak PHK sehingga Daya Beli Masyarakat menurun secara drastis.

Karena itu, penguasaan terhadap pengetahuan, ilmu dan teknologi melalui pendidikan berkualitas adalah hal penting yang harus dilakukan untuk merespon berbagai momentum di atas agar hak-hak ekonomi rakyat dapat tetap terlindungi terhadap berbagai kemungkinan dampak yang terjadi,

c. Analisis Faktor Sosial

Globalisasi telah mengakibatkan perubahan yang sangat drastis dan signifikan dalam kehidupan masyarakat dunia, dicirikan adanya dinamika perkembangan, kompleksitas, tingginya tingkat persaingan yang disebabkan akibat adanya intensitas interaksi antar bangsa, etnis, bahasa, budaya dan peradaban dunia. Globalisasi memberikan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat dunia, yang ditandai dengan berbagai fakta yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat dunia.

Pada level internasional beberapa persoalan sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat dunia antara lain : (1) Terjadinya pengangguran dan kemiskinan global, dimana jumlah penduduk dunia yang menganggur dan miskin semakin bertambah secara drastis; (2) Terjadinya kejahatan dan kriminalitas global, yaitu tingkat kejahatan dan kriminalitas dunia meningkat drastis (perdagangan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang, kasus narkoba/HIV di kalangan orang muda/pelajar dan perdagangan senjata, terorisme, dll); (3) Jumlah negara miskin meningkat, yaitu terjadinya peningkatan jumlah negara miskin di dunia.

Pada level nasional beberapa persoalan sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat nasional antara lain : (1) Meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan nasional, (2) meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas nasional (perampokan, pembunuhan, tawuran, pengrusakan, kasus narkoba dan HIV, dll); (3) Terkikisnya nilai-nilai budaya nasional, yaitu semakin rendahnya kebanggaan akan identitas dan jati diri bangsa, dan terancamnya pelestarian nilai-nilai budaya nasional, tergeser oleh arus globalisasi.

Lingkungan sosial, budaya dan peradaban manusia harus memberikan tempat bagi setiap manusia untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi kehidupannya. Hal itu sangat dimungkinkan apabila setiap orang memiliki

pengetahuan, ilmu dan teknologi yang diperlukan dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingannya pada lingkungan sosial, budaya dan peradaban. Dalam rangka itu, mendapatkan hak akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi sesuatu yang mutlak dan penting bagi setiap orang, karenanya menjadi wujud penghargaan atas hak sosial budaya seseorang.

c. Analisis Faktor Teknologi

Era globalisasi banyak ditandai dengan revolusi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran kemajuan teknologi tersebut telah membawa perkembangan baru dalam peradaban kehidupan manusia. Hal tersebut menuntut adanya perubahan paradigma dalam kehidupan masyarakat global, yang penuh dengan dinamika, perkembangan, kompleksitas dan kompetisi.

Pada level internasional, bangsa-bangsa di dunia tidak dapat lagi hanya mengandalkan keunggulan berbasis sumber daya alam (*resources-based competitiveness*), namun bergeser dengan harus mengandalkan keunggulan berbasis pengetahuan (*knowledge-based competitiveness*). Keunggulan dalam penguasaan IPTEK dan akses informasi akan menjadi faktor determinan yang menentukan daya saing dalam proses kompetisi di pasar global yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan dan penguasaan IPTEK dan akses informasi dalam masyarakat global, dibutuhkan beberapa faktor penunjang antara lain : (1) SDM yang berkualitas, (2) Sarana/Prasarana (Infrastruktur), (3) Dana, (4) Regulasi; dalam rangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi, yang ditopang oleh nilai-nilai luhur, moral, budaya dan wawasan kebangsaan, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Pada level nasional, perkembangan IPTEK mendorong penyelenggaraan tata pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disebut E-Government. E-Government adalah sistem untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau transformasi dari hubungan internal dan eksternal sektor publik melalui proses

teknologi informasi dan komunikasi dengan menciptakan optimalisasi pelayanan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan E-Government membutuhkan adanya 4 faktor pendukung, yaitu : (a) Manajemen dan Kebijakan, (b) Dukungan Infrastruktur & Teknologi, (c) Sumber Daya Manusia, (d) Pembiayaan dan Prioritas. Dalam rangka itu, mendapatkan hak akses terhadap kemajuan IPTEK bidang teknologi informasi dan komunikasi, maka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi sesuatu yang mutlak dan penting bagi setiap orang, karena menjadi wujud penghargaan atas hak pendidikan seseorang.

3.1.2 Analisis 5 Faktor Penggerak Porter

Analisis pada lingkungan bisnis dilakukan dengan menggunakan analisis 5 Faktor Penggerak Porter, yang terdiri atas faktor-faktor berikut ini : (1) *New Market Entrance*, (2) *Supplier Power*, (3) *Substitute*, (4) *Buyer Power*, dan (5) *Competitive Rivalry*.

Pertama, *New Market Entrance*, yaitu menganalisis masuknya penyedia jasa pendidikan dari luar negeri yang baru juga dapat menjadi ancaman bagi pengembangan pendidikan. Kedua, *Supplier Power*, yaitu menganalisis kemampuan penyedia jasa pendidikan lain yang akan menjadi kekuatan bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, *Substitute*, yaitu menganalisis keberadaan jasa-jasa pendidikan bertaraf internasional yang sudah ada yang akan menjadi ancaman bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan. Keempat, *Buyer Power*, yaitu menganalisis kemampuan pengguna jasa pendidikan dalam melakukan penawaran yang menjadi ancaman bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan. Kelima, *Competitive Rivalry*, yaitu menganalisis tingkat persaingan sesama penyedia jasa pendidikan yang akan menjadi ancaman bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan.

3.1.3 Identifikasi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*)

Berdasarkan hasil analisis PEST dan analisis Porter, maka dapat dilakukan identifikasi terhadap **PELUANG** dan **ANCAMAN** yang terdapat dalam

pengembangan strategi penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat, sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1
Identifikasi Peluang dan Ancaman Terhadap
Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Barat

NO	PELUANG	ANCAMAN
1	Kemampuan penyedia jasa pendidikan di Jawa Barat semakin meningkat	Maraknya bisnis penyedia jasa pendidikan di Jawa Barat
2	Pentingnya aspek pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh dunia.	Persaingan bisnis jasa-jasa pendidikan di Jawa Barat dengan tingkat persaingan yang terus meningkat
3	Pentingnya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan dalam rangka perwujudan SDM yang berkualitas	Kemampuan Pengguna Jasa Dalam Melakukan Penawaran akan menjadi ancaman bagi pengembangan Sekolah
4	Masyarakat berkewajiban memberikan Dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.	Krisis ekonomi yang banyak menimpa masyarakat secara luas.
5	Masyarakat Dunia terintegrasi dalam jaringan komunikasi dan informasi global melalui penggunaan teknologi internet.	Krisis Keuangan Negara Amerika Serikat yang berdampak global, yang memicu Krisis ekonomi di seluruh dunia
6	Perkembangan teknologi informasi yang terjadi secara cepat dan menggglobal	Banyak masyarakat terkena PHK yang menurunkan kemampuan daya beli masyarakat secara umum
7	Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi demikian pesat di tanah air.	Jumlah penduduk Indonesia menganggur dan miskin semakin bertambah secara Drastis

Sumber : Diolah berdasarkan Analisis PEST dan Analisis PORTER

3.2 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) DINAS

3.2.1 Analisis 7 S Mckensey

Model 7 S Mckensey merupakan kerangka kerja baru untuk melakukan analisis dan peningkatan efektivitas kerja secara terorganisasi dari penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat. Ada 7 faktor yang dikaji dalam

analisis 7 S Mckensey, yaitu : (1) Staff, (2) Sistem, (3) Structure, (4) Skill, (5) Share (Value), (6) Style, dan (7) Srategi, seperti pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2
Analisis Kekuatan dan Kelemahan Dari
Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Barat

FAKTORS	KEKUATAN	KELEMAHAN
STAFF	Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Untuk Semua Jenjang Cukup Memadai	Sense of belonging pada lembaga yang masih rendah, Kemampuan dalam English Conversation dan Pembelajaran Berbasis Multimedia/TIK
SISTEM	Kurikulum yang mengacu SNP (8 Standar), Pengembangan KTSP, Kurikulum 2013, Pembelajaran PAKEM, Manajemen Berbasis Sekolah, Manajemen Strategik	Keterbatasan Sarana Penunjang Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013 Keterbatasan Pemahaman Pembelajaran PAKEM Keterbatasan Pemahaman MBS, dll.
STRUCTURE	Eksistensi Organisasi Dinas, Adanya Struktur, Tupoksi, SOP Dinas Adanya Dewan Pendidikan Provinsi.	Kapasitas Kelembagaan SDM Dinas , Managerial dan Kepemimpinan Transformatif, Pemberdayaan Peran dan Fungsi Masyarakat Peduli Pendidikan belum optimal. Struktur Organisasi tidak sesuai dengan penyelenggaraan urusan.
SKILL	Birokrat dan Tenaga Administrasi Pendidikan Dengan Kompetensi yang baik Tenaga Pendidik SLB dan 4 SMK Provinsi dengan 'multi skill' dan 'multi talent'	Pemberdayaan kompetensi dari Birokrat yang belum optimal. Keterbatasan sarana penunjang pengembangan multi skill dan multi talent, Kegiatan – kegiatan terprogram
SHARE	Ethos Kerja dan Budaya Kerja Birokrasi dan Tenaga Administrasi Yang Tinggi Berorientasi pada mutu	Belum ditempatkan sistem 'reward' and 'punishment' yang sesuai
STYLE	Kepemimpinan Dinas pada setiap level Yang Demokratis dan Partisipatif serta Visioner	Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Membatasi Konsistensi Otonomi Daerah (Otonomi Pendidikan) yang masih bergantung pada Provinsi (belum sesuai dengan semangat MBS)
STRATEGI	Tersusunnya Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Dinas dalam sebuah RENSTRA Dinas	Kendala Anggaran dalam implementasi strategi Konsisten Implementasi Rumusan Strategi Dalam Program, Kegiatan Operasional Dinas

3.2.2 Identifikasi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan hasil analisis 7 S Mc Kensey, maka dapat dilakukan identifikasi terhadap **KEKUATAN** dan **KELEMAHAN** yang terdapat pada pengembangan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat dirumuskan secara umum sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Identifikasi Peluang dan Ancaman
Terhadap Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Barat

NO.	KEKUATAN	KELEMAHAN
1	Kualitas dan Profesionalitas SDM	Kesejahteraan dan Bentuk Penghargaan Yang Lemah
2	Manajemen dan Kepemimpinan Organisasi	Sistem Birokrasi dan Kendala Anggaran Managerial dan Kepemimpinan Transformasional Dan Visioner.
3	Iklim Organisasi dan Budaya Organisasi	Keterbatasan Daya Dukung Pengembangan
4	Perumusan dan Perencanaan Strategis Dinas	Implementasi Strategi Operasional Dinas

Sumber : Diolah berdasarkan Analisis 7 S Mc Kensey

3.3. SWOT ANALYSIS

3.3.1 Matriks SWOT

Setelah dapat diidentifikasi tentang S, W, O dan T, selanjutnya adalah menyusun matriks SWOT dinas. Matriks SWOT ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun empat kategori strategi, yaitu : (1) strategi S-O, (2) strategi W-O, (3) strategi S-T dan (4) strategi W-T. Dalam menyusun matriks SWOT, diperlukan upaya untuk menentukan *Key Success Factors* (KSF) untuk lingkungan eksternal dan internal dinas secara benar.

Pertama, strategi S-O, adalah strategi yang menggunakan S internal dinas untuk meraih O yang ada di luar organisasi. Kedua, strategi W-O, adalah strategi yang berusaha untuk memperkecil W internal dengan memanfaatkan O dari eksternal. Ketiga, strategi S-T, adalah strategi untuk menghindari atau mengurangi dampak T dari luar dengan memanfaatkan S internal. Keempat, strategi W-T, adalah strategi untuk bertahan dengan cara mengurangi W dari internal dan menghindari T dari luar.

3.4 STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Dengan melakukan pendekatan SWOT Analysis, maka 3 (tiga) pilihan strategi ke depan untuk menyelenggarakan pembangunan pendidikan di Jawa Barat tahun 2013-2018, yaitu :

3.4.1 Strategi Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan mengandung arti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal tersebut akan sangat sejalan dengan program yang tengah digulirkan pemerintah pusat yaitu *education for all* (Pendidikan Untuk Semua/PUS) yang menghendaki tidak ada seorangpun warga Negara yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan, setiap warga negara berhak akan pendidikan sepanjang hayat.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan sangat terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pendidik/tenaga kependidikan. Kondisi saat ini, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah lulusan SD/Setingkat SD dan SMP/Setingkat SMP dengan kapasitas daya tampung sekolah di atasnya (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) sehingga mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Permasalahan lainnya dari pemerataan yaitu belum meratanya persebaran sekolah dengan sebaran penduduk di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan di satu pihak ada sekolah yang kekurangan murid, sebaliknya ada pula sekolah yang justru tidak mampu menampung murid. Selain hal tersebut di atas, masih banyak wilayah di

Jawa Barat yang terisolir (terpencil) dan tertinggal sehingga belum tersentuh sarana dan prasarana pendidikan.

3.4.2 Strategi Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan berkaitan dengan kondisi mutu atau kualitas lulusan pendidikan atau sekolah. Salah satu indikator dari mutu lulusan ini sangat berkorelasi dengan pencapaian rata-rata nilai UAN dan penyerapan tenaga kerja pasca sekolah. Data menunjukkan, banyak siswa yang nilai UAN nya belum optimal, hanya di atas standar nilai kelulusan dan tidak sedikit pula lulusan yang menganggur karena mereka tidak memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan dunia usaha/industri. Mutu lulusan juga dapat dipengaruhi pula oleh proses pembelajaran satuan pendidikan, dimana tingkat penerapan pembelajaran berbasis TIK di Jawa Barat masih rendah, dan secara formal belum ditangani sebuah pengelolaan yang baik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Faktor-faktor lain yang berpotensi terhadap rendahnya mutu pendidikan : (1) belum adanya wadah yang dapat menampung hasil-hasil kreasi siswa (Pusat Promosi Produk Hasil Kreasi Siswa) = pusat promosi produk kejuruan; (2) masih lamban upaya peningkatan kompetensi guru dibandingkan laju perkembangan IPTEK; dan (3) belum optimalnya penerapan kurikulum yang berlaku dan belum terimplementasinya secara optimal pendidikan karakter atau budi pekerti berdasarkan nilai budaya bangsa dan kearifan lokal Jawa Barat untuk membentuk value, daya saing dan karakter bangsa.

3.4.3 Strategi Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan

Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan pendidikan berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen atau tata kelola pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota sampai dengan level sekolah-sekolah atau penyelenggara kegiatan pendidikan. Aspek manajemen akan sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan. Termasuk di dalam aspek ini yaitu manajemen

penyelenggaraan persekolahan dan manajemen birokrasi pendidikan yang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu lulusan pendidikan. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu perlunya akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu satuan pendidikan.

Tata kelola pendidikan pada saat ini belum sepenuhnya berbasis pada basis data atau sistem informasi pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel. Sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara provinsi, kabupaten/kota sampai ke sekolah-sekolah belum berjalan sebagaimana yang diinginkan, dengan mengintegrasikan peranan teknologi informasi sebagai sebuah daya dukung. Terbatasnya fungsi dan peran sistem pendataan atau informasi pendidikan tersebut juga sangat mempengaruhi akuntabilitas dan pencitraan public dari layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

3.5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Arah kebijakan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan payung-payung hukum yang akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- b. Mendayagunakan seluruh asset potensial yang dimiliki baik dalam bentuk prasarana/sarana maupun sumber daya manusia secara optimal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang lebih berorientasi kepada upaya pemenuhan hak-hak masyarakat akan pendidikan melalui peningkatan akses, mutu dan tatakelola pendidikan.
- d. Membangun koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan pendidikan antara provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat yang berorientasi kedepan (maju) serta tetap mengakar pada nilai budaya Jawa Barat dengan seoptimal mungkin memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi secara efisien dan efektif.

- e. Membangun kerjasama yang baik dan harmonis antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan stakeholders pendidikan serta dunia usaha/industri demi terwujudnya pembangunan pendidikan yang berkualitas, produktif dan berdaya saing.
- f. Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan prioritas membangun sistem pendataan pendidikan yang efisien dan efektif sebagai alat bantu utama dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan pendidikan di Jawa Barat.
- g. Melakukan pemetaan pendidikan dalam upaya pemerataan dan demokratisasi pendidikan di Jawa Barat.
- h. Bekerjasama dengan Kabupaten/Kota dan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan (akses, kualitas, peningkatan daya beli/ekonomi masyarakat) yang tidak mungkin dapat dipecahkan hanya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- i. Optimalisasi peran dunia usaha/dunia industri (DU/DI) serta BUMN/BUMD dalam rangka Corporate Social Responsibility (CSR).

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN JAWA BARAT

4.1 Visi dan Misi Pendidikan Provinsi Jawa Barat

4.1.1. Visi Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018, ditetapkanlah visi pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk SDM
yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis
budaya Jawa Barat”***

Hal-hal menyangkut pengertian, ruang lingkup atau batasan dari setiap pernyataan dalam visi tersebut agar menuju pada satu penafsiran/ atau persepsi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. ***Pendidikan maju*** adalah pendidikan yang berorientasi jauh ke masa depan (*futuristik*), peka dan tanggap terhadap setiap perubahan situasi atau dinamika politik, hukum, sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi; dan secara optimal menerapkan sistem tatakelola (manajemen) modern dengan memanfaatkan teknologi informasi, teknologi komunikasi yang mutakhir.
2. ***Sumber Daya Manusia (SDM) yang “berkarakter”*** adalah SDM yang memiliki komitmen tinggi dengan dirinya yang dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan, keimanan, kebangsaan atau nasionalisme serta budaya dalam kehidupan nyata (realitas hidup),

menuju kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa yang lebih bermartabat dalam tatanan dan pergaulan masyarakat dunia atau global.

3. ***Sumber Daya Manusia (SDM) yang “cerdas”*** adalah SDM yang memiliki kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memecahkan permasalahan-permasalahan dalam realitas kehidupan yang nyata, serta mampu memberikan solusi yang optimal dan tuntas dari permasalahan yang dipecahkan tersebut secara efektif dan efisien, logis atau rasional dan sistematis.
4. ***Sumber Daya Manusia (SDM) yang “mandiri”*** adalah SDM yang memiliki keyakinan terhadap kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan diri dalam mengambil setiap keputusan dan melakukan setiap tindakan secara efektif dan efisien menuju kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa yang lebih baik dengan tidak bergantung kepada pihak lain.
5. ***Sumber Daya Manusia (SDM) yang “menguasai IPTEK”*** adalah SDM yang memiliki kapasitas, kemauan, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan untuk membiasakan secara terus menerus mengembangkan diri terhadap kegiatan riset atau penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna membangun kepercayaan diri yang tinggi untuk mampu bersaing dan unggul dalam kancah pergaulan dan tantangan masyarakat dunia atau global.
6. ***Sumber Daya Manusia (SDM) yang “berbasis budaya Jawa Barat”*** adalah SDM yang memiliki kapasitas, penghormatan, rasa cinta dan memiliki sikap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal Jawa Barat, sebagai landasan berfikir dan bertindak di dalam merumuskan ide, gagasan dan konsep pendidikan berbudaya yang integral dan utuh, serta mampu mengaplikasikannya dalam realitas kehidupan pada keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan serta dalam pergaulan masyarakat dunia atau global.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dari visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah terwujudnya pendidikan yang maju di Jawa Barat pada tahun 2018, dengan karakteristik atau ciri-ciri berorientasi jauh

ke masa depan; dan peka atau tanggap terhadap setiap perubahan situasi politik, hukum, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Situasi pendidikan maju di Jawa Barat akan terwujud diakibatkan oleh dukungan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang :

- a. memiliki komitmen tinggi dengan dirinya sendiri;
- b. memiliki kesadaran untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan, keimanan, kebangsaan atau nasionalisme, budaya dan kearifan lokal Jawa Barat dalam realitas kehidupan;
- c. memiliki kapasitas, kemampuan dan kecakapan serta ketrampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan setiap permasalahan dalam realitas kehidupan;
- d. mampu memberikan solusi optimal dan tuntas dari setiap permasalahan secara efisien dan efektif secara logis, rasional dan sistematis;
- e. memiliki kapasitas, keyakinan terhadap kemampuan dirinya tanpa adanya ketergantungan kepada orang/pihak lain;
- f. memiliki kemauan dan kemampuan untuk terus menerus melakukan pengembangan diri dalam riset atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. memiliki penghormatan, rasa cinta dan memiliki sikap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal Jawa Barat sebagai landasan berfikir, pengambilan keputusan, bersikap dan bertindak dalam realitas kehidupan;
- h. memiliki kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam menerapkan sistem tatakelola (manajemen) modern; yang didukung oleh pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang mutakhir;
- i. memiliki kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan guna bersaing dan memiliki keunggulan di dalam pergaulan dan tantangan kehidupan masyarakat dunia atau global.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian Visi Dinas Pendidikan Jawa Barat pada tahun 2018 yang akan datang, yakni :

1. Terwujudnya “kemajuan” dalam proses sistem tata kelola atau manajemen pendidikan di Jawa Barat;
2. Dihasilkannya output pendidikan yang memiliki karakter dan berbudi pekerti luhur;
3. Dihasilkannya output pendidikan dengan kecerdasan majemuk sehingga memiliki keunggulan dan daya saing;
4. Dihasilkannya output pendidikan yang berjiwa entrepreneurship dan produktif sehingga memiliki kemandirian;
5. Dihasilkannya output pendidikan dengan pembiasaan dan penguasaan IPTEK yang maju;
6. Dihasilkannya output pendidikan yang mampu menghargai, mencintai, mendayagunakan dan melestarikan budaya Jawa Barat.

4.1.2 Misi Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoperasionalkan dan mewujudkan visi pendidikan Provinsi Jawa Barat tersebut dinyatakan atau dirumuskan misi pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas;
2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing sumber daya manusia bidang pendidikan;

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pendidikan Tahun 2013-2018

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan pendidikan tahun 2013-2018 secara lebih jelas dan konkret. Berikut penjelasan lebih detailnya.

4.2.1 Tujuan Pembangunan Pendidikan

Untuk mewujudkan misi pendidikan dapat ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan di Jawa Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan di Jawa Barat.
2. Meningkatkan kompetensi dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Barat.

4.2.2 Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan diperlukan pengembangan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan pendidikan, yaitu pada tahun 2018. Sasaran strategis yang dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Pengembangan Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Misi 1	:	Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas;
Tujuan 1	:	Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan di Jawa Barat.

Sasaran Strategis								Cara mencapai tujuan dan sasaran		Ket
Sasaran	Indikator Kinerja	Awal Tahun 2013	Target Tahunan Ke							
			2014	2015	2016	2017	2018	Kebijakan	Program	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-DIKMAS)	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	48,7	61,85	75	76,75	78,5	80,25		Bidang PAUDNI	

	Jumlah Lembaga Penyelenggara PAUD	12844	14400	17280	20160	23040	25920		Bidang PAUDNI	
	Prosesntase berkurangnya angka buta huruf (meningkatnya angka melek huruf)	97-97.50	97.50-98	98-98.50	98.50-99	99-99.50	99-99.50		Bidang PAUDNI	
	Meningkatnya Jumlah lembaga kursus dan pelatihan	1800	1940	2080	2220	2360	2500		Bidang PAUDNI	
Menurunn ya angka putus sekolah (DO) jenjang pendidika n dasar	Angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs	95	98,47	100	100	100	100		Bidang Dikdas	
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (APK SD)	119,31	119,82	120,34	120,85	121,37	121,88		Bidang Dikdas	
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (APK	94,55	95,58	96,61	97,64	98,67	99,7		Bidang Dikdas	

	SMP)									
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs		0	400	600	800	1000		Bidang Dikdas	
	Jumlah penyelegaraan SMP terbuka dan SD-SMP Satu Atap	665	667	671	675	700	683		Bidang Dikdas	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs	1070	1500	2000	2000	2000	2000		Bidang Dikdas	
	Meningkatnya sekolah SD berstandar nasional (SSN)	627	684	739	803	900	1000		Bidang Dikdas	
	Meningkatnya sekolah SMP berstandar nasional (SSN)	312	478	644	809	975	1141		Bidang Dikdas	
	Angka Lulusan Pendidikan Dasar (SD)	95	98,4	100	100	100	100		Bidang Dikdas	
	Angka Lulusan (SMP)	75	76	80	85	90	95		Bidang Dikdas	

Meningkatnya layanan pendidikan menengah dan tinggi secara merata	Angka Partisipasi Kasar (APK SM)	67,68	72,42	77,49	82,91	88,71	94,92		Bidang Dikmenti	
	Prosentase Angka Melanjutkan dari jenjang SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	75	76	80	85	90	95		Bidang Dikmenti	
	Angka melanjutkan dari jenjang SM (SMA/MA/SMK) ke perguruan Tinggi	17,50	20,50	25,50	30,50	35,50	40,50		Bidang Dikmenti	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK	2000	2500	2000	2000	2000	2000		Bidang Dikmenti	
	Meningkatnya jumlah anak-anak buruh dan TKI yang menerima	1000	1000	1000	1000	1000	1000		Bidang Dikmenti	

	beasiswa pendidikan									
	Meningkatnya Kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi	2196	2969	3196	3969	5000	4696		Bidang Dikmenti	
Meningkatnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PKPLK) yang berkualitas	Persentase Kab/Kota penyelenggara Pendidikan Inklusif	5	10	30	40	50	60		Bidang PKPLK	
	Jumlah rehabilitasi dan ruang kelas baru SLB Negeri	38	42	46	50	54	60		Bidang PKPLK	

	Jumlah guru SD/SMP/SMA-LB yang menyelesaikan S1 dan D4	1507	1922	2338	2753	3169	3584		Bidang PKPLK	
--	--	------	------	------	------	------	------	--	--------------	--

Misi 2	:	Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing sumber daya manusia bidang pendidikan;
Tujuan 1	:	Meningkatkan kompetensi dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Barat.

Sasaran Strategis								Cara mencapai tujuan dan sasaran	Ket	
Sasaran	Indikator Kinerja	Awal Tahun 2013	Target Tahunan Ke							
			2014	2015		2014	2015	Kebijakan	Program	
1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Jumlah Guru SD/SMP/SMA/SMK dengan kualifikasi S1 dan D4	229658	241141	253198	265858	279151	293108		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

dan profesional pada semua jenjang pendidikan										
Meningkatnya layanan yang berkualitas pada manajemen sekolah dan manajemen pendidikan	Prosentase sekolah yang terakreditasi	20	22	24	26	28	30		BAP, Bidang Dikmenti	
	Jumlah sekolah SD/SMP/SMA/SMK yang telah terintegrasi dengan database	20	30	50	70	90	100		Bidang Dikdas, Dikmenti Sekretariat	

4.2.3 Strategi dan Kebijakan Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2013-2018 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan Jawa Barat. Selain itu dipertimbangkan pula hasil capaian pembangunan pendidikan hingga tahun 2013. Strategi dan arah kebijakan ini juga dikembangkan dengan memperhatikan komitmen Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Jawa Barat tahun 2013-2018 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten/Kota, berkaitan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang menjadi penjabaran visi dan misi pembangunan di Jawa Barat. Telaah terhadap sasaran-sasaran yang dimaksud telah dirumuskan pada naskah RPJMD Jawa Barat 2013-2018, menunjukkan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata. Kebutuhan tersebut mencakup sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, dan tata kelola.

4.2.4 Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2013-2018

Strategi memberikan gambaran tentang upaya dan langkah-langkah sistematis untuk mencapai misi pembangunan yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan. Dalam pengembangan strategi pembangunan pendidikan di Jawa Barat tahun 2013-2018 yang dilandasi oleh misi untuk Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas, perlu dijelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi,

serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat. Seperti telah diungkapkan dalam RPJMD Jawa Barat 2013-2018. Strategi pembangunan pendidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-DIKMAS)
2. Menurunnya angka putus sekolah (DO) jenjang pendidikan dasar
Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatnya layanan pendidikan menengah dan tinggi secara merata
4. Meningkatnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PKPLK) yang berkualitas
5. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional pada semua jenjang pendidikan
6. Meningkatnya layanan yang berkualitas pada manajemen sekolah dan manajemen pendidikan

Selama 5 (lima) tahun ke depan, strategi pembangunan pendidikan tersebut menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengambil dan memutuskan kebijakan pembangunan pendidikan. Ketiga strategi pembangunan pendidikan tersebut pada dasarnya merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Barat, penetapannya sebagai prioritas tentu saja dipengaruhi oleh capaian pembangunan bidang pendidikan pada periode sebelumnya dan harapan ideal dunia pendidikan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang disesuaikan dan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Jawa Barat.

Bila dicermati secara mendalam, strategi pembangunan pendidikan yang pertama berkaitan erat dengan makin meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan, guna mengantisipasi perkembangan kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan persaingan dalam kehidupan masyarakat dunia. Untuk itu pencapaian pendidikan pada jenjang dasar, dirasakan kurang memadai lagi untuk mengimbangi dinamika kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan untuk menempuh pendidikan jenjang menengah menjadi suatu keniscayaan. Selain itu dengan komitmen yang tinggi terhadap kepentingan pembangunan pendidikan, program-program bantuan pembiayaan pendidikan

dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diperkuat oleh program BOS Daerah (BOSDA) yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi. Program-program tersebut dalam implementasinya memerlukan pengembangan sistem pengelolaan yang memadai, agar efektivitasnya untuk tujuan wajib belajar jenjang pendidikan menengah 12 tahun dapat tercapai.

Sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi melebihi rata-rata nasional, Jawa Barat membutuhkan penyediaan sumberdaya produktif untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang terus berkembang. Untuk itu dirasakan perlunya strategi peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan kejuruan. Proporsi 70% : 30% antara Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Umum menjadi acuan dasar untuk menambah dan mengupayakan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan baru di berbagai wilayah Jawa Barat . Selain itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan, demi meningkatnya kualitas lulusan, guna menjawab kebutuhan dunia kerja yang juga terus meningkat tuntutan nya atas sumberdaya yang berpengetahuan dan berketerampilan memadai.

Kesadaran untuk menanamkan pendidikan sejak dini, menjadikan peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai strategi yang diprioritaskan dalam pembangunan pendidikan di Jawa Barat . Fenomena yang ada di lapangan, belum semua wilayah, terutama di daerah pedesaan tersedia lembaga pendidikan bagi anak usia dini tersebut. Sementara di perkotaan penyelenggaraan PAUD banyak dilakukan oleh pihak swasta dengan biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperluas kesempatan mengikuti PAUD di kalangan masyarakat di segala strata dan tempat tinggal yang berbeda, melalui pendirian lembaga penyelenggara PAUD. Di samping perluasan perlu pula dikembangkan program-program pendidikan untuk meningkatkan kualitas PAUD, melalui penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, sarana prasarana, dan sistem manajemen PAUD yang baik.

Peningkatan kualitas pendidikan secara umum menjadi prioritas strategi pembangunan pendidikan di Jawa Barat. Hal ini dapat dipahami berdasar kesadaran

bahwa persaingan global termasuk di dalamnya dalam bidang pendidikan makin meningkat. Untuk itu pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan perlu ditingkatkan kualitasnya. Perhatian khusus pada lembaga pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren, hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pendidikan yang dimaksud perlu ditingkatkan agar secara relatif tidak jauh tertinggal dari lembaga pendidikan umum yang ada di masyarakat luar Pondok Pesantren. Selain itu secara kuantitatif di Jawa Barat jumlah lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren jumlahnya besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Terakhir perhatian pada pentingnya peningkatan minat baca, menjadi strategi pembangunan pendidikan yang menjadi prioritas. Kemajuan teknologi komunikasi telah membawa sebagian besar anggota masyarakat terutama anak-anak tersita waktunya untuk menekuni dunia maya, melalui berbagai program jejaring sosial dan program-program permainan. Dampak negatif dapat ditimbulkan dari kecenderungan tersebut, dan untuk mengimbangnya diperlukan strategi pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan minat baca.

4.2.5 Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2013-2018

Berdasarkan sasaran pembangunan pendidikan seperti tersebut di atas, dikembangkan 7 (tujuh) arah kebijakan pendidikan yang akan diputuskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat .

- a. Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu dan Peningkatan pemerataan dan akses PAUD
- b. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- c. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah;
- d. Peningkatan pendidikan non-formal;
- e. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (*bridging program*) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

- f. Peningkatan pelayanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus berkualitas di seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Barat
- g. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga Pendidik dan kependidikan secara merata;

Selanjutnya berdasarkan arah kebijakan yang akan diputuskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , dikembangkan program-program pendidikan untuk diaplikasikan dan diharapkan membawa kemajuan dalam membangun pendidikan di Provinsi Jawa Barat .

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PENDIDIKAN
JAWA BARAT

5.1. Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 dikembangkan program-program pembangunan bidang pendidikan, yang secara operasional akan diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat. Program-program pembangunan pendidikan yang dikembangkan dalam RPJMD Jawa Barat 2013-2018 dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengelolaannya ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Untuk menyikapi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana Matrik pembagian urusan bidang pendidikan untuk manajemen pendidikan Pemerintah Provinsi mengelola pendidikan menengah dan Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Program-Program Pembangunan Pendidikan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang di implementasikan pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Menengah
2. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Penyelenggaraan Unsur Manajemen dan Fungsi Manajemen
5. Program Pembinaan Bahasa dan Sastra

Selain program seperti telah dipaparkan di atas, program pembangunan pendidikan dilakukan pula melalui berbagai program penguatan layanan birokrasi pendidikan. Serangkaian program yang terkait dengan hal tersebut meliputi :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
4. Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur
6. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Aparatur

Disadari bahwa peningkatan kapasitas layanan birokrasi memiliki arti yang sangat penting bagi keberhasilan program-program pendidikan yang dicanangkan, oleh karena itu urgensi atas pengembangan program-program yang terkait dengan penguatan dan peningkatan layanan birokrasi menjadi relevan.

Program Pendidikan PAUD Non Formal Informal bertujuan agar semua anak usia dini, laki laki maupun perempuan, terutama yang berasal dari keluarga miskin, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangan atau tingkat usia mereka, sebagai persiapan mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Mereka umumnya berasal dari keluarga miskin, dan tinggal di daerah pedesaan. Program ini dititikberatkan pada peningkatan akses dan pelayanan pendidikan melalui jalur formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat; juga jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; serta informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Program Pendidikan Non Formal bertujuan memberikan layanan pendidikan, untuk laki-laki maupun perempuan, terutama penduduk miskin, sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan

pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi. Program Pendidikan Non Formal pada periode pembangunan pendidikan 2014-2019 memprioritaskan peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dengan mengintensifkan pemberantasan buta huruf di beberapa kabupaten yang angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bertujuan menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar SMP/MTs, termasuk Paket B. Program ini dititikbertakan untuk meningkatkan angka lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka putus sekolah dan mengulang kelas di kalangan peserta didik SMP/MTs/Paket B, sehingga seluruh penduduk usia 13-15 tahun dapat menyelesaikan, setidaknya, pendidikan pada jenjang menengah pertama.

Program Pendidikan Menengah bertujuan menuntaskan perluasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, menjadi 12 tahun, yang telah dirintis sejak Januari 2008. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan menengah SMA/MA, termasuk Paket C, yang murah dan bermutu. Program ini dititikberatkan untuk menampung lulusan jenjang SMP/MTs/Paket B yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/MA/Paket C, serta untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16-18 tahun. Mengingat pada 2013, terdapat 46,02% anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum/tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Peningkatan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun menjadi Pendidikan Menengah 12 Tahun, terutama ditujukan untuk kabupaten/kota yang Angka Partisipasi Kasar

(APK) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, telah mencapai 95% atau lebih. Program Pendidikan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Seperti diketahui rendahnya APK Perguruan Tinggi di Jawa Barat menjadi salah satu isu strategis. Tidak seperti jenjang pendidikan dasar dan menengah yang setiap peserta didiknya memperoleh bantuan pendanaan, di Perguruan Tinggi jumlah peserta didik yang memperoleh bantuan biaya pendidikan terbatas, dengan persyaratan yang bersangkutan harus memiliki prestasi akademik yang tinggi. Sementara itu biaya pendidikan di Perguruan Tinggi relatif tinggi dan tidak terjangkau oleh anggota masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu perlu dikembangkan program pendidikan untuk menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi, dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan tinggi, sebagai rintisan Program Wajib Belajar 15 tahun.

Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas anak-anak yang mengalami keterbelakangan fisik maupun mental dalam mengenyam layanan pendidikan. Fenomena yang ada di masyarakat, masih besar jumlah anak, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil belum dapat mengakses layanan pendidikan, oleh karena tidak tersedianya lembaga pendidikan luar biasa. Untuk itu program sekolah inklusif perlu dikembangkan dan diimplementasikan.

Program Manajemen Pelayanan bertujuan mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas pada manajemen sekolah dan manajemen pendidikan yang mana meningkatkan jumlah sekolah yang terakreditasi pada semua jenjang pendidikan, jumlah dan kualitas database sekolah-sekolah pada semua jenjang pendidikan yang terkomputerisasi dan terintegrasi.

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik, baik laki-laki maupun perempuan, pada satuan pendidikan formal dan non-formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan

dialogis, menilai hasil pembelajaran, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu diperlukan program-program yang memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya sesuai dengan spesifikasi bidang yang menjadi tugasnya. Disisi lain perlu juga dikembangkan program-program untuk pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan yang akan memotivasi kinerja mereka.

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya yang bertujuan mewujudkan peningkatan apresiasi dan upaya pelestarian budaya, nilai-nilai kearifan lokal, bahasa, sastra dan kesenian daerah pada semua, meningkatkan jumlah guru mata pelajaran seni budaya dan mata pelajaran bahasa dan sastra daerah di Jawa Barat pada semua jenjang.

Berdasarkan program pembangunan pendidikan seperti telah dikemukakan di atas, disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, dapat dirumuskan sejumlah kegiatan untuk merealisasikan program yang dimaksud. Di samping itu penyusunan dan perumusan kegiatan juga mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang terumuskan selanjutnya akan dijadikan acuan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merealisasikan penggalangan pendanaan. Terkait dengan hal tersebut diperlukan adanya kecermatan dan ketelitian dalam penyusunannya, karena akan menentukan terealisasinya kegiatan di masing-masing bidang khususnya dan secara umum di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang dirumuskan dengan acuan rencana program pembangunan pendidikan, membuka peluang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu bidang. Oleh karena itu dimungkinkan kegiatan yang dirumuskan dilaksanakan antar bidang.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan program pembangunan pendidikan, selanjutnya perlu dirumuskan indikator kinerja program. Indikator kinerja program menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapainya. Indikator kinerja program pada matriks yang disusun hanya

dipaparkan deskripsinya, capaian secara kuantitatif untuk setiap tahun akan dipaparkan di Bab berikutnya dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selanjutnya perlu diungkapkan pula kelompok sasaran program maupun kegiatan. Penetapan kelompok sasaran penting sebagai acuan agar program pembangunan yang direncanakan tertuju pada pihak-pihak yang menjadi sasaran pembangunan. Kekurangtepatan dalam menentukan kelompok sasaran akan mengakibatkan program-program pembangunan pendidikan yang direncanakan tidak berdaya guna, dan pada akhirnya dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan.

5.2. Kelompok Sasaran

Penetapan kelompok sasaran mengacu pada program pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan. Di samping itu penetapan kelompok sasaran memberikan kejelasan tentang arah tujuan program beserta pelaksanaan kegiatannya. Kelompok sasaran didasarkan pada program pembangunan pendidikan semula, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Kelompok Sasaran Program Tahun 2013-2018

NO	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN
A.	PROGRAM PRIORITAS :		
1	Program Bidang Pendidikan Tenaga Kependidikan Bina PAUDNI dan DIKDAS	Terjangkaunya layanan pendidikan dasar untuk semua secara merata bagi warga masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya angka putus sekolah (DO) jenjang pendidikan dasar, • Meningkatnya daya tampung siswa SD/MI, SMP/MTs dan Pesantren, • Meningkatnya jumlah sekolah bermutu SD DAN SMP berstandar Nasional (SD SSN dan SMP SSN).
		Terjangkaunya layanan pendidikan anak usia dini, non-formal dan informal (PAUDNI) untuk semua secara merata bagi warga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD), • Meningkatnya pelayanan pendidikan non-formal (pendidikan masyarakat), • Meningkatnya pelayanan

		masyarakat	pendidikan non-formal (kursus dan pelatihan) untuk peningkatan kompetensi dan ketrampilan.
2	Program Pendidikan Menengah	Terjangkaunya layanan pendidikan menengah dan tinggi untuk semua secara merata bagi warga masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya angka putus sekolah (DO) jenjang pendidikan menengah, • Meningkatnya daya tampung siswa SMA/MTs dan SMK, • Meningkatnya Angka Melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi.
4	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Terjangkaunya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus berkualitas untuk semua secara merata bagi warga masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang berkualitas, • Meningkatnya kompetensi guru PK- PLK.
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya peningkatan layanan yang berkualitas pada manajemen sekolah dan manajemen pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi pada semua jenjang pendidikan , • Meningkatnya jumlah dan kualitas database sekolah-sekolah pada semua jenjang pendidikan yang terkomputerisasi dan terintegrasi.
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Berkualitas dan Profesional pada semua jenjang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan , • Meningkatnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih (pada semua jenjang).
7	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Terwujudnya peningkatan apresiasi dan upaya pelestarian budaya, nilai-nilai kearifan lokal, bahasa, sastra dan kesenian daerah pada semua	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah guru mata pelajaran seni budaya dan mata pelajaran bahasa dan sastra daerah di • Jawa Barat pada semua jenjang

B.	PROGRAM NON - PRIORITAS :		
8	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan program pendidikan secara efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perencanaan kegiatan secara efektif dan efisien, • Melaksanakan monitoring, dan evaluasi kegiatan secara efektif dan efisien, • Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan secara efektif dan efisien.
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sistem pelaporan kinerja (SAKIP) secara efektif dan efisien, • Melaksanakan sistem pelaporan keuangan secara efektif dan efisien,
10	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sistem kepegawaian secara efektif dan efisien, • Melaksanakan sistem reward dan punish ment pegawai secara efektif dan efisien,
11	Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sistem administrasi perkantoran secara efektif dan efisien,
12	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sistem analisa kebutuhan barang/jasa secara efektif dan efisien, • Melaksanakan pengadaan/pengembangan sarpras secara efektif dan efisien.
13	Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeliharaan sarpras secara efektif dan efisien.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA RPJMD PROVINSI
JAWA BARAT

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengemban amanat untuk mewujudkan misi pertama yakni : “Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing”. Secara khusus, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap pencapaian Tujuan pertama dari misi pertama dimaksud, yakni : Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas ; Terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang harus dicapai, yakni :

7. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-DIKMAS)
8. Menurunnya angka putus sekolah (DO) jenjang pendidikan dasar
Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
9. Meningkatnya layanan pendidikan menengah dan tinggi secara merata
10. Meningkatnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PKPLK) yang berkualitas
11. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional pada semua jenjang pendidikan
Meningkatnya layanan yang berkualitas pada manajemen sekolah dan manajemen pendidikan.

Sasaran strategis dimaksud diuraikan dalam beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja dan Rencana Tingkat Capaian Bidang Pendidikan
Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018**

No	Indikator Kinerja	Rencana					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Melek Huruf	97-	97,50-	98,00-	98,50-	99,00-	99,00-
		97,50	98,00	98,50	99,00	99,50	99,50
2	Angka rata-rata lama sekolah	8,20 -	8,25 -	8,30 -	8,50 -	8,75 -	9,10 -
		8,25	8,30	8,50	8,75	9,10	9,50
3	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	APM (SD/MI/Paket A)	96,97	97,10	98,74	98,85	99,00	99,50
	APM SMP/MTs/Paket B	74,12	74,82	77,17	79,50	80,00	85,00
	APM SMA/MA/SMK/Paket C	52,76	58,28	60,71	65,00	70,00	85,00
4	Angka Partisipasi Kasar						
	APK PAUD	48,7	61,85	75,0	76,75	78,5	80,25
	APK (SD/MI/Paket A)	119,31	119,82	120,34	120,85	121,37	121,88
	APK SMP/MTs/Paket B	94,55	95,58	96,61	97,64	98,67	99,7
	APK SMA/MA/SMK/Paket C	67,68	72,42	77,49	82,91	88,71	94,92

Dalam rangka mewujudkan rencana tingkat capaian (target) sasaran sebagaimana termaktub dalam RPJMD tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan capaian akhir periode perencanaan pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. APK PAUD Jawa Barat mencapai 80,25%, sekurang-kurangnya 62,96% (17 kabupaten/kota) mencapai APK PAUD di atas rata-rata tingkat Provinsi Jawa Barat .
2. APK SD/MI/Paket A Jawa Barat mencapai 121,8 %, sekurang-kurangnya 85,18% (23 kabupaten/kota) mencapai $APK\ SD/MI/Paket\ A \geq 121,8\%$.
3. APM SD/MI/Paket A Jawa Barat mencapai 99,5 %, sekurang-kurangnya 85,18% (23 kabupaten/kota) mencapai $APM\ SD/MI/Paket\ C \geq 99,5\%$.

4. APK SMP/MTs/Paket B Jawa Barat mencapai 99,7 %, sekurang-kurangnya 74,0% (20 kabupaten/kota) mencapai APK SMP/MTs/Paket B \geq 99,7 %.
5. APM SMP/MTs/Paket B Jawa Barat mencapai 85 %, sekurang-kurangnya 74,0% (20 kabupaten/kota) mencapai APM SMP/MTs/Paket B \geq 85%.
6. APK SMA/MA/Paket C Jawa Barat mencapai 94,92 %, sekurang-kurangnya 62,96% (17 kabupaten/kota) mencapai APK SMA/MA/Paket C \geq 94,92%.
7. APM SMA/MA/Paket C Jawa Barat mencapai 85 %, sekurang-kurangnya 62,96% (17 kabupaten/kota) mencapai APM SMA/MA/Paket C \geq 85 %.
8. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100 %.
9. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 95 %.
10. Angka Rata-rata Lama Sekolah kelompok penduduk usia 15 ke atas di Jawa Barat mencapai 9,10 - 9,50 tahun.
11. Angka melek huruf untuk kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Barat menjadi 99,00 – 99,50 %.
12. Sekurang-kurangnya 74 % (20 kabupaten/kota) di Jawa Barat memiliki rasio guru/siswa SD/MI 1:32 , SMP/MTs 1:36, dan SMA/SMK/MA 1: 40
13. Sekurang-kurang 95 % guru SD/MI memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan ijazah yang diampunya.
14. Sekurang-kurangnya 97 % guru SMP/MI memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya.
15. Sekurang-kurangnya 99% guru SMA/SMK/MA memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya.
16. Persentase Guru SD/MI Jawa Barat berkualifikasi akademik D4/S1 mencapai 94 %
17. Persentase Guru SD/MI Jawa Barat bersertifikasi mencapai 65 %.
18. Persentase Guru SMP/MTs Jawa Barat berkualifikasi akademik D4/S1 mencapai 91 %
19. Persentase Guru SMP/MTs Jawa Barat bersertifikasi mencapai 55 %.
20. Persentase Guru SMA/SMK/MA Jawa Barat berkualifikasi akademik D4/S1 mencapai 97 %
21. Persentase Guru SMA/SMK/MA Jawa Barat bersertifikasi mencapai 40%.

22. Angka Mengulang SD/MI Jawa Barat menjadi 0,4 %.
23. Angka Mengulang SMP/MTs Jawa Barat menjadi 0,02%.
24. Angka Mengulang SMA/SMK/MA Jawa Barat menjadi 0,10%.
25. Angka Putus Sekolah (ApuS) SD/MI/Paket A Jawa Barat menjadi 0,5 %
26. Angka Putus Sekolah (ApuS) SMP/MTs/Paket B Jawa Barat menjadi 1,0 %.
27. Angka Putus Sekolah (ApuS) SMA/SMK/MA/Paket C Jawa Barat menjadi 0,75%.
28. Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SD/MI/Paket A Jawa Barat mencapai 78,00
29. Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/Paket B Jawa Barat mencapai 70,00
30. Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/MA/Paket C Jawa Barat mencapai 70.00
31. Sekolah SD/MI kondisi bangunan ruang kelas baik mencapai 50 %.
32. Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan ruang kelas baik mencapai 60 %.
33. Sekolah SMA/SMK/MA kondisi bangunan ruang kelas baik mencapai 75%.
34. Sekolah SD/MI di Jawa Barat 97 % diakreditasi, sekurang-kurangnya 75 % sekolah SD/MI terakreditasi minimal B.
35. Sekolah SMP/MTs di Jawa Barat 85% diakreditasi, sekurang-kurangnya 50 % sekolah SMP/MTs terakreditasi minimal B.
36. Sekolah SMA/SMK/MA di Jawa Barat 75,00% diakreditasi, sekurang-kurangnya 40 % sekolah SMA/SMK/MA terakreditasi minimal B.
37. Rasio siswa/kelas SD/MI Jawa Barat mencapai 1:32
38. Rasio siswa/kelas SMP/MTs Jawa Barat mencapai 1:36
39. Rasio siswa/kelas SMA/SMK/MA Jawa Barat mencapai 1:40
40. Sekurang-kurangnya 80% (27 kabupaten/kota) di Jawa Barat memiliki keseimbangan jumlah sekolah antar jenjang.
41. Seluruh kabupaten/Kota di Jawa Barat telah memiliki sekolah inklusif untuk semua jenjang pendidikan.
42. Sekurang-kurangnya 75% lembaga kursus dan pelatihan di Jawa Barat berakreditasi.

43. Rasio jumlah sekolah SMK/SMA di Jawa Barat 70% :30%
44. Seluruh kabupaten/kota sekurang-kurangnya memiliki sebuah SMK yang memiliki jurusan (bidang keahlian) relevan dengan potensi ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan

Berbagai capaian yang telah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2018 , merupakan sasaran antara yang diharapkan memiliki kontribusi yang nyata terhadap tingkat capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat .

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan acuan legal bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan program dan kegiatan ke depan selama periode tahun 2013-2018. Sebagai acuan pengembangan program dan kegiatan ke depan, Renstra disusun dengan memperhatikan dan mencermati kecenderungan dinamika perkembangan pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait dengannya, seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Catatan penting yang perlu disampaikan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah acuan tujuan pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata. Seperti diketahui tujuan pembangunan tersebut pada prinsipnya identik dengan prioritas pembangunan bidang pendidikan Jawa Barat periode 2009-2013, yaitu Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat dimaklumi berdasarkan pemikiran bahwa pengambil kebijakan di Provinsi Jawa Barat masih memandang persoalan pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan belum sepenuhnya terpecahkan dan dicapai secara memuaskan. Meskipun demikian perlu disadari bahwa dalam naskah Grand Design Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada periode pembangunan pendidikan 2016-2020 Jawa Barat seharusnya sudah memasuki tahap daya saing regional, hal tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, dimana pada periode pembangunan 2015-2020 tahap pembangunan pendidikan di Indonesia telah memasuki tahap peningkatan mutu, relevansi dan daya saing regional. Dengan mempertimbangan hal tersebut, maka visi yang dikembangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk SDM yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis budaya Jawa Barat”. Berdasarkan visi tersebut, dikembangkan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan yang tetap mengacu pada tujuan pembangunan

pendidikan Jawa Barat seperti yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat tahun 2013-2018 , diperkaya dengan tujuan untuk mencapai daya saing dan daya sanding baik pada tataran nasional maupun global.

Sejumlah tantangan pada dasarnya masih menghadang dalam pengupayakan pembangunan pendidikan di Jawa Barat , tantangan yang nampak nyata adalah tingginya tingkat diferensiasi capaian pembangunan pendidikan yang terjadi di antara kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. Capaian-capaian keberhasilan secara tetera di tingkat provinsi seringkali menjadi nampak kurang menggembirakan, karena rendahnya capaian pembangunan pendidikan di beberapa kabupaten yang laju pembangunan pendidikannya memang lambat. Untuk itu prioritas sasaran pembangunan pendidikan perlu diarahkan pada beberapa kabupaten yang tertinggal dalam pembangunan pendidikannya, dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain. Upaya yang demikian seharusnya diikuti oleh peningkatan koordinasi dan kerjasama antara kabupaten yang tertinggal dengan kabupaten/kota yang mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan pendidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qudri Azizy, 2007, *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*, Jakarta : Gremedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Jean Baechler, 2001, *Demokrasi : Sebuah Tinjauan Analisis*, (terjemahan Bern Hidayat), Yogyakarta: Kanisius.
- Leo Agustino, 2006, *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI Bandung
– Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Nanang Fattah, 2003, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugrogo. (2008). *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Pemerintah Republik Indonesia, 2003, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, (Kumpulan UU Otonomi Daerah Tahun 2004)*, Bandung : Fokusmedia.
- Pamudji, 1981, *Ekologi Administrasi Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Porter, Michael E., 2008, *Competitive Advantage*, Tangerang : Karisma Publishing Group.
- Tripomo, Tedjo, dkk., 2005, *Manajemen Strategi*, Bandung : Rekayasa Sains.
- Umar, Husien, 2003, *Strategic Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wicaksono, W. Kristian, 2006, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*,
Yogyakarta: Graha Ilmu.